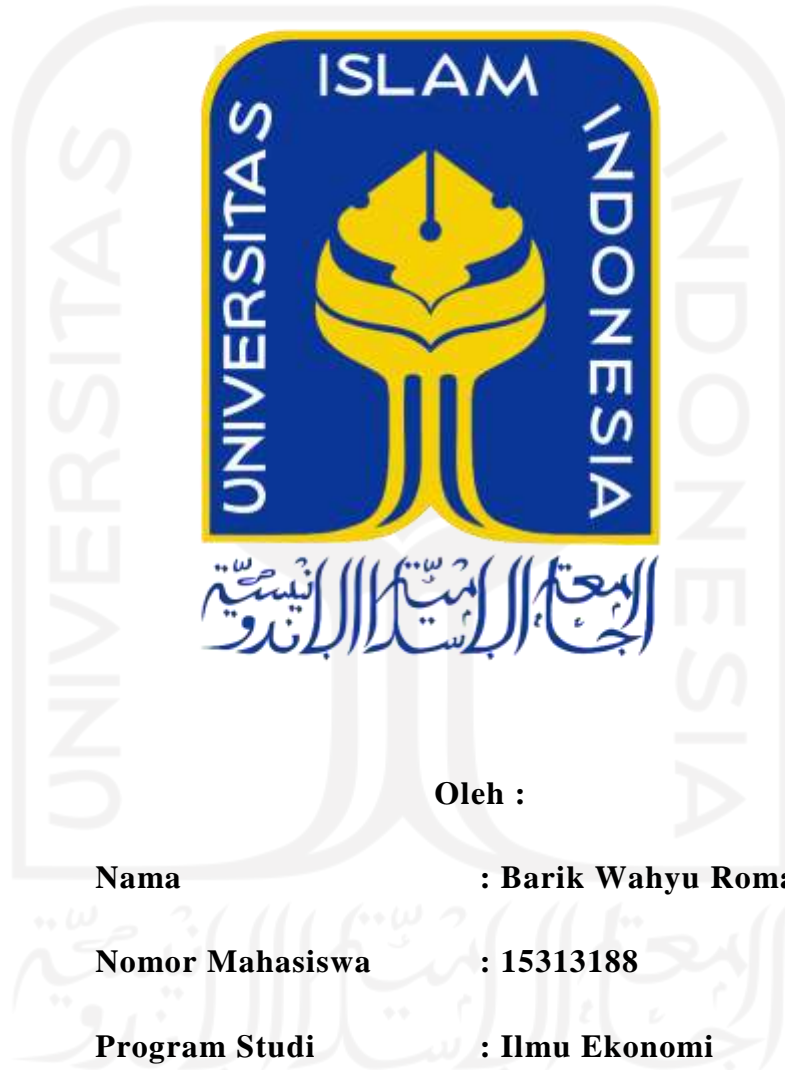


**ANALISIS PEMIKIRAN MUBYARTO:
PENGENTASAN KEMISKINAN
SKRIPSI**



Oleh :

Nama : Barik Wahyu Romadlon

Nomor Mahasiswa : 15313188

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA YOGYAKARTA**

2021

**ANALISIS PEMIKIRAN MUBYARTO : PENGENTASAN
KEMISKINAN**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Barik Wahyu Romadlon

Nomor Mahasiswa : 15313188

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FBE UIL. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuma/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2021


Barik Wahy

10000
METERAI
TEMPEL
BEGDADJ068960827

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

PENGESAHAN
STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUBYARTO:
PENGENTASAN KEMISKINAN

Nama : Barik Wahyu Romadlon
Nomor Mahasiswa : 15313188
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 30 Juni 2021
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,


Eko Atmaji, Dr., S/E., M.Ec

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PEMIKIRAN MUBYARTO: PENGENTASAN KEMISKINAN

Disusun Oleh : **BARIK WAHYU ROMADLON**

Nomor Mahasiswa : **15313188**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 11 Agustus 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Eko Atmadji,Dr.,S.E., M.Ec.



Penguji : Rokhedi Priyo Santoso,,S.E., MIDEc.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

الجمعة الاستاذة
الاستاذة
الاستاذة

MOTTO

”Berotak London, Berhati Masjidil Haram” K.H Mustain Romli.

“Orang bijak adalah ia yang merasa suatu saat merasa bersalah” Pak Faqeh

“Kamu boleh tidak masuk kelas saya, yang penting produktif, paling tidak karena sedang melakukan transaksi minimal satu milyar “ Pak Ridwan

“Belajar dari ia yang tak pernah berhenti belajar” Kajdie MM

“Pendidikan tetap utama, persoalan *income* kita sendiri yang merumuskan”

“bangun habits, kita rumuskan peradaban yang mulia”

“Semoga menjadi intelektual organik yang soleh, dan mampu membahasakan ilmu dalam masyarakat”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah dan nikmat Allah yang telah memberikan kesehatan, kekuatan serta nikmat yang lainnya, sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Studi Pemikiran Mubyarto : Ekonomi Pancasila” Skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir sekaligus syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Selama menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, arahan, bimbingan, doa dan suport dari berbagai pihak dan kalangan. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir akademik.
2. Kedua orangtua yang sangat saya hormati, cintai dan banggakan.
3. Segenap guru dan dosen Ilmu Ekonomi yang telah mendoakan dan membagikan ilmu dan pengalamannya selama saya menjadi mahasiswa hingga menyelesaikan skripsi.
4. Segenap teman-teman Ilmu Ekonomi dan UII
5. Sahabat-sahabat PMII UII & DIY.
6. Teman-teman IMADA dan IKAMALA Yogyakarta
7. Saudara-saudara PSHT baik UKM PSHT UII, Forkom PSHT DIY.
8. Teman-teman Heuheu, Kontrakan dan Kos (Advokad, Amanah, At-Taya).


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, dan sholawat serta salam kepada sang revolusioner sejati Rosulullah Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Studi Analisis Pemikiran Mubyarto: Pengentasan Kemiskinan**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ini banyak mengalami kendala dan kekurangan. Namun berkat bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak dan berkah Allah Swt sehingga kendala-kendala dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta keberkahan bagi semua pembacanya dan memberikan refrensi bagi peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 30 Juni 2021


Barik Wahyu Romadlon

NIM: 15313188

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGSAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TEORI KEMISKINAN	
2.1 Kemiskinan dari Perspektif Teori.....	17
2.1.1 Teori Kemiskinan	17
2.1.2 Produksi Jangka Pendek	19
2.1.2.1 Produksi Total	21

2.1.2.2 Produksi Rata-rata	22
2.1.2.3 Produksi Marginal	22
2.2 Klasifikasi dan Indikator Kemiskinan	25
2.3 Faktor Penyebab Kemiskinan	32
2.4 Strategi Penurunan Kemiskinan	35
BAB III BIOGRAFI DAN EKONOMI PANCASILA PEMIKIRAN MUBYARTO	
3.1 Riwayat Hidup Mubyarto	39
3.2 Sejarah Ekonomi Pancasila	41
3.3 Kemiskinan Pemikiran Mubyarto.....	44
3.3.1 Kemiskinan di Indonesia	44
3.3.2 Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Mubyarto..	48
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUBYATO TERHADAP KEMISKINAN	
4.1 Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran Pustaka.....	65
Lampiran (Tabel).....	70

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Islam Indonesia:

Nama : Barik Wahyu Romadlon


NIM : 15313188

Demi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan literasi, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Indonesia karya ilmiah saya yang berjudul : *Analisis Pemikiran Mubyarto : Pengentasan Kemiskinan*

Dengan demikian saya memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain untuk keperluan akademis, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Dengan ini pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 Juni 2021



Barik Wahyu Romadlon

Analisis Pemikiran Mubyarto : Pengentasan Kemiskinan

Barik Wahyu Romadlon

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia

E-mail: 15313188@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pemikiran Mubyarto dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan daripada penelitian ini adalah mengemukakan biografi dan pemikiran Mubyarto terhadap pengentasan kemiskinan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi pemikiran tokoh yang bersumber dari buku karya Mubyarto (*Study Literary*) dan berbagai literasi yang berkaitan. Mubyarto merupakan salah satu ekonom Indonesia yang menggaungkan Ekonomi Pancasila. Ciri daripada perekonomian tersebut berasaskan nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar untuk menjalankan perekonomian. Hasil dari Penelitian ini menganalisis pemikiran Mubyarto mengenai pengentasan kemiskinan yang termuat dalam beberapa pokok pemikiran Mubyarto. Diantaranya gotong-royong sebagai bentuk usaha bersama, multidisiplin keilmuan untuk mengidentifikasi kemiskinan secara komprehensif, dan koperasi sebagai saka guru perekonomian.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, Ekonomi Pancasila, Gotong-royong, Multidisiplin keilmuan, Koperasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai *Homo Economicus* (makhluk ekonomi) selalu berpikir rasional dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Ilmu ekonomi sebagai Ratu dari ilmu-ilmu sosial (*the queen of social sciences*) yang di mana setiap orang akan terlibat dalam perekonomian (Mubyarto dan Awan, 2004:3-5). Oleh sebab itu tidak akan pernah berakhir dalam melakukan kajian, penelitian dan diskursus mengenai ekonomi, baik dari segi perilaku masyarakat hingga teori sebagai dasar ilmiah untuk merumuskan tatanan ekonomi yang berkeadilan. Teori Ekonomi yang diajarkan dalam setiap bangku pendidikan tidak pernah lepas dari dalil yang menyatakan bahwa : “*kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan bahan dan alat pemuas kebutuhan manusia terbatas*”. Hal ini juga dinyatakan bahwa kebutuhan manusia selalu meningkat, seiring dengan peningkatan pendapatan seseorang. Namun kita sebagai seorang yang menganut ajaran agama dan moral pancasila, apakah dalil ini relevan atau realistis?

Istilah Kebutuhan dalam teori ekonomi *neo-klasik* selalu diartikan sebagai perasaan serba kurang, namun dalam realitanya, baik perorangan maupun antar golongan tidak bisa disamakan untuk menentukan kebutuhannya. Misalnya kebutuhan seorang *manajer* perusahaan dengan seorang buruh tani yang ada di pedesaan. Dalam artian hal ini akan selalu memiliki batasan kebutuhan, baik batasan itu berupa standar moral (agama), kemampuan sosial-ekonomi hingga

pendapatan seorang. Adanya Ilmu Ekonomi seharusnya dapat memberikan pencerahan dan perubahan kepada kaum pelajar maupun masyarakat umum agar dapat berlaku secara *efisien* dan *efektif* yaitu dengan mengkombinasikan rasionalitas dan kata hati, dengan lebih bijak dalam setiap memutuskan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan (Mubyarto, 2004f:6).

Pasca Perang Dunia II persebaran ideologi sekuler turut mewarnai dinamika ekonomi dunia. Perpecahan tersebut mengakibatkan lahirnya dua blok besar dari negara yang terlibat perang, yakni blok barat dan blok timur, sedangkan negara yang tidak berpihak dari keduanya identik disebut dengan negara non-blok. Dua ideologi besar yang turut menjadi senjata utama untuk berebut pengaruh di negara berkembang selama perang dingin yakni kapitalisme-liberal dan sosialis-komunis (Syarfudin dan Isnawati, 2009:116). Indonesia sebagai negara yang merdeka tanpa mengemis kepada penjajah, sejak awal sudah menyatakan sikap dengan tidak memihak antara blok barat atau blok timur, namun Indonesia menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Maka dari itu sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia harus menentukan tatanan ekonomi yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bung karno pernah menyatakan trilogi atau trisakti untuk bangsa Indonesia yakni : *berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan* (Syarfudin dan Isnawati, 2009:126).

Negara bekas jajahan seperti Indonesia tidak begitu saja dilepaskan, namun mereka tetap menancapkan cakarnya di Indonesia dengan berbagai pengaruh dan intervensi. Intervensi dari negara barat tersebut adalah upaya agar Indonesia mau meniru negara-negara maju dengan dalih menolong, mereka merasuk ke dalam berbagai sektor seperti badan usaha negara maupun produk hukum (undang-undang) di Indonesia (Mubyarto, 2005b:2). Peralihan kepemimpinan Presiden dari Soekarno ke Soeharto, pada tahun 1967 diwarnai dengan liberalisasi perekonomian Indonesia yang terkesan memaksakan diri, dengan membuka keran masuknya modal asing untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis besar-besaran di Indonesia. Semakin banyaknya bisnis besar memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kelimpahan barang di pasar, namun bersamaan dengan itu kemiskinan akan semakin meluas, karena ketimpangan antara masyarakat kaya dan menengah ke bawah masih tinggi. Dalam hal ini keberpihakan pemerintah dipertanyakan (Dawam, 2004:43).

Permasalahan bagi negara berkembang yang selalu menghantui adalah kemiskinan, begitu juga yang dihadapi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini masih belum kunjung selesai dalam mengentaskan kemiskinan. Sejak Maret 2006 data kemiskinan menunjukkan angka 17,75% dari jumlah penduduk Indonesia, bahkan hingga bulan Maret 2020 kemiskinan masih berada di angka 9,7%, hal ini sempat mengalami kenaikan sebesar 0,56% dari bulan september 2019. Merespon dinamika kemiskinan, Mubyarto turut merumuskan konsepsi-konsepsi dalam mengentaskan kemiskinan yang dialami Indonesia, terutama

dampak pasca reformasi yang turut memporak-poranda perekonomian di Indonesia (BPS, 2020).

Menjelang berakhirnya Orde Baru banyak kalangan merasa kebingungan, karena selama itu banyak teknokrat yang dianggap sebagai pahlawan pembangunan ekonomi namun tidak dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menyelamatkan krisis moneter pada tahun 1997-1998. Ujung dari fenomena tersebut adalah dengan kesan mengulang sejarah kelam yakni dengan menghadirkan kembali pihak asing sebagai juru selamat, seperti IBRD, IMF dan UNSFIR. Keterlibatan pihak asing tersebut membuat kesan bahwa kita selalu didikte oleh ekonom asing yang tidak paham ekonomi Indonesia dibanding ekonom-ekonom Indonesia (Mubyarto, 2004e: 9).

Pada saat itu Indonesia tidak hanya mengalami krisis ekonomi, namun juga krisis Ilmu Ekonomi, seperti yang disampaikan oleh Mubyarto bahwa bangsa Indonesia kekurangan jalan alternatif dalam menentukan arah kebijakan setelah dilanda krisis yang mengguncang perekonomian Indonesia (Mubyarto, 2004g:12). Ilmu Ekonomi yang didapatkan dari barat dan dijadikan bahan pengajaran di Indonesia sebagaimana aslinya tanpa disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia, maka akan menjurus ke arah ketidakadilan (Mubyarto, 1982:7). Oleh sebab itu tanpa mengkaji ulang teori arus utama yang dijadikan dasar dalam kebijakan selama ini, maka tidak mudah untuk keluar dari krisis yang terjadi. Mubyarto memandang bahwa ilmu ekonomi yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan masih mengalami kelemahan, salah satunya adalah karena melihat berbagai masalah lepas dari masalah moral. Hubungan moral agama dan ilmu

ekonomi yakni semua agama mengajarkan kepada umat manusia agar bertindak baik, *tepa slira*, supaya tidak hanya mementingkan masa sekarang, tetapi masa yang akan datang baik di dunia dan kelak di akhirat. Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih membutuhkan khazanah keilmuan ekonomi yang sesuai dengan budayanya (Mubyarto, 2004a:23).

Menurut Mubyarto, lahirnya pemikiran ekonomi karena munculnya permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Akan ada titik di mana pemikiran ekonomi tertentu tidak dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ekonomi dalam masyarakat. Karena pemikiran ekonomi tidak ada yang sifatnya mutlak atau tidak dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ekonomi di negara tertentu, atau istilahnya lain ladang lain belalang. Mubyarto menyadari dan menyatakan bahwa teori dari barat tidak bisa sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia, dalam hal ini Mubyarto setuju dengan pemikiran Boeke mengenai dualistik ekonomi dalam suatu negara. Boeke menyatakan "*Di Indonesia tidak bisa teori barat dipakai, karena disini hidup berdampingan dua sistem yang tidak berbaur. Sistem modern berjalan sendiri dan sistem tradisional rakyat juga berjalan sendiri*" (Mubyarto, 1982:9). Sistem perekonomian dan ideologi yang mendominasi di suatu negara tidak ada yang sempurna, baik itu sosialis-komunis maupun kapitalis-liberal. Pada akhir dasawarsa ini hampir seluruh negara menerapkan sistem perekonomian campuran, oleh sebab itu sudah sepatutnya Indonesia merumuskan tatanan ekonomi yang sesuai dengan dasar negara yakni Pancasila.

Mengingat problem ekonomi yang dihadapi Indonesia namun seringkali tidak dapat menyelesaikan secara mandiri, dengan menghadirkan pihak asing sebagai sumber solusi, secara tidak langsung sikap tersebut menurunkan harga diri bangsa Indonesia. Salah satu pakar sosiolog Prof. Sayogjo pernah mengingatkan dalam seminar pada tahun 1960an, ia mengatakan *“jika anda ingin mengerti perekonomian negara kami, kajilah kebudayaan dan sistem politik kami. Jika ingin memahami kebudayaan dan sistem politik kami, kajilah peerkonomian kami.”* Dalam artian bahwa perekonomian Indonesia tidak mungkin dipelajari dan dipahami dengan hanya menggunakan data-data statistika termasuk data makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi atau pendapatan per kapita. Karena perlu menggunakan pendekatan budaya sebagai salah satu instrumen memahami karakter dan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya (Mubyarto, 2004d:14).

Mubyarto menyadari dan meyakini bahwa ilmu ekonomi yang selama ini diajarkan kepada mahasiswa di Indonesia adalah keliru. Beliau menyatakan bahwa teori ilmu ekonomi yang selama diajarkan bukanlah ekonomi Indonesia, akan tetapi ilmu ekonomi Amerika (Dumairy dan Tarli, 2016:21). Teori-teori ekonomi dari barat semakin masif diajarkan di Indonesia, akan tetapi kita tidak boleh menerima secara mentah. Meski Mubyarto sekolahnya di barat dan teori-teorinya barat, namun beliau mampu memfilter teori dan pemikiran ekonom barat sehingga tidak menerima dengan mentah begitu saja atas apa yang sudah dipelajari disana. Beliau menyesuaikan diri dengan memahami realita, budaya dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam merumuskan pemikiran ekonomi, di mana ada perbedaan

mendasar bagi bangsanya dan keadaan di negara lahirnya teori barat (Mubyarto, 1982:24).

Ilmu Ekonomi adalah ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan yang harus berpihak terhadap kepentingan kemajuan manusia. Meski seringkali mengalami pasang surut dalam penafsiran dan fungsinya, Mubyarto meyakini bahwa ilmu ekonomi akan selalu dikembalikan oleh pemikir ekonomi ke arah kemanfaatan yang lebih besar bagi kemajuan kemanusiaan (Mubyarto, 2004c:22). Pada tahun 1960-70an banyak negara serumpun belajar dalam bidang apa saja dari Indonesia, namun dalam 3 dekade terakhir setelah itu hal ini berubah signifikan karena dalam banyak hal mereka ternyata lebih maju dan justru Indonesia semakin ketinggalan. Bahkan rasa nasionalisme yang pernah dibanggakan bangsa Indonesia karena kemerdekaan yang telah direbut melalui revolusi, kini juga cenderung luntur. Hal ini dengan terbukti keberanian Malaysia dalam menjaga harga diri dan percaya diri lebih tinggi dengan melawan kekuatan asing dengan menolaknya IMF (*international Monetary Found*) (Mubyarto, 2004a:2).

Perkembangan dalam upaya melahirkan tokoh-tokoh ekonom di Perguruan Tinggi dianggap masih kurang. Salah satu sebab sehingga banyaknya mahasiswa Indonesia yang skeptis terhadap gagasan alternatif ekonomi, karena tidak dilibatkan oleh dosen dalam penelitian induktif-empirik sehingga dosen-dosen tidak bisa memberikan contoh konkrit apa yang terjadi di lingkungan masyarakat (Mubyarto, 2005a:2). Salah satu hal yang membuktikan bahwa Mubyarto tidak menerima begitu saja atas teori dan pemikiran yang dipelajari selama ia kuliah di barat adalah, dengan merumuskan hipotesa pemikirannya hingga melakukan eksperimen untuk

membuktikan bahwa teori dari barat tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia.

Berlandaskan dasar negara Indonesia yakni Pancasila, Mubyarto merumuskan konsep perekonomian yang dianggap lebih sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ekonomi Pancasila diartikan sebagai pemahaman ekonomi yang dijiwai oleh sila-sila yang ada dalam Pancasila, sedangkan Ekonomi Kerakyatan adalah manifestasi dari Ekonomi Pancasila, yang pada penerapannya sesuai dengan tuntutan masyarakat serta perkembangan zaman. Melihat realita dalam disiplin ilmu ekonomi, apakah Indonesia masih kekurangan pakar ekonom agar bisa mengetahui persoalan perekonomian bangsanya. Sehingga mampu melahirkan rumusan yang sesuai dengan budaya dan perekonomian Indonesia? (Mubyarto, 2004f:21).

Fenomena krisis ekonomi yang terjadi pada akhir abad 20 telah menguji kemampuan berbagai pihak untuk menyelesaikan dan memulihkan keadaan. Masalah utama yang dihadapi ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 1997 bahkan hingga saat ini bukanlah pengangguran melainkan kemiskinan. Penjelasan sederhana yang dapat mengutarakan problem tersebut adalah bahwa orang miskin sudah tentu hidup dalam kondisi kekurangan, sedangkan mereka yang menganggur belum tentu miskin. Selama ini data dan angka mengenai pengangguran di Indonesia tidak disertai dengan keterangan, apakah mereka dalam keadaan hidup normal atau jauh dari hidup layak. Realita pengangguran di negara maju dibanding dengan negara berkembang atau negara terbelakang tidak selalu bisa disamakan. Di

negara maju para penganggurannya mendapat jaminan biaya hidup setidaknya sekali dalam dua minggu (Mubyarto, 2004e:14).

Mubyarto menyatakan keresahannya pada saat pidato pengukuhan sebagai guru besar sekaligus profesor ekonomi yakni tentang teori ekonomi yang digunakan di Indonesia (sistem neo-liberal), sistem tersebut menurutnya tidak efektif dalam mengatasi jurang kemiskinan di Indonesia. Kritik yang disampaikan yakni mengenai dominasi teori-teori ekonomi dari barat dalam setiap merumuskan kebijakan pemerintah Indonesia. Menurutnya, teori klasik memang bisa dijadikan referensi untuk kebijakan dalam pertumbuhan ekonomi, akan tetapi berlainan jika teori tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan pemerataan ekonomi di negara berkembang. Pada masa pemerintahan Orde Baru sempat menggunakan teori W.W. Rostow mengenai pertumbuhan ekonomi dengan konsep berjangka yakni REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), untuk Repelita I dan II menurut Mubyarto bisa dianggap berhasil. Akan tetapi dalam Repelita berikutnya dampaknya dari hasil tidak sesuai dengan prediksi dalam teori tersebut, yang pada akhirnya menjadikan jurang pemisah antara miskin dan kaya (Dumairy dan Tarli, 2016:26).

Salah satu alasan yang mendasari untuk mengambil studi pemikiran Ekonomi Pancasila yang digagas dan dirumuskan oleh Mubyarto yakni karena terasa kurangnya studi literasi mengenai sejarah perekonomian dan pemikiran tokoh ekonomi. Pentingnya mempelajari sejarah dan pemikiran ekonom yakni agar kita bisa berpijak dan melangkah lebih maju dalam menganalisa perekonomian. Lahirnya pemikiran Mubyarto perlu diapresiasi sebagai bentuk titik perkembangan

ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi. Dengan karya-karyanya dapat mengilhami ekonom yang lain untuk merumuskan pemikiran ekonomi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademisi hingga pemerintah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan.

Melalui tugas akhir strata satu jurusan Ilmu Ekonomi ini penulis turut tersentuh untuk membedah dan menyelami pemikiran Mubyarto yang kurang begitu dibahas di bangku kuliah selama ini. Sedangkan tidak sedikit ekonom Indonesia hingga saat ini yang dapat kita pelajari dan dikembangkan terkait pemikirannya. Namun kenyataan lain, bahwa selama ini perguruan tinggi di Indonesia masih berkiblat dengan teori-teori barat yang sebenarnya masih dipertanyakan relevansinya terhadap budaya dan perekonomian Indonesia, baik sejak orba maupun hingga hari ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas ada beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis. Untuk mengkaji dan membahas maka perlu adanya batasan atau konsentrasi dalam pembahasan dengan “**Analisis Pemikiran Mubyarto: Pengentasan Kemiskinan**” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Awal munculnya gagasan Ekonomi Pancasila
- 1.2.2 Bagaimana pemikiran Mubyarto terhadap perekonomian Indonesia?
- 1.2.3 Pendekatan yang digunakan Mubyarto terhadap pengentasan kemiskinan

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep pemikiran Mubyarto mengenai Ekonomi Pancasila terhadap kemiskinan yang memfokuskan pada pokok pemikiran, maka dalam penelitian perlu dirumuskan kegunaan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui pemikiran Ekonomi Pancasila Mubyarto.
- b. Agar mengetahui pemikiran Mubyarto tentang pengentasan kemiskinan.
- c. Agar mengetahui dan memahami perkembangan Pemikiran Ekonomi di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis : Manfaat bagi penulis dan pembaca yakni, dapat memahami dan menambah wawasan mengenai pemikiran Mubyarto maupun Ilmu Ekonomi. Sehingga gagasannya dapat menjadi literasi dan pengaruh kebermanfaatannya bagi studi pemikiran ekonomi Indonesia.
- b. Bagi kampus : Memperkaya penulisan Pemikiran dan Biografi tokoh terutama tentang Pemikiran Ekonomi Indonesia
- c. Bagi akademisi : Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi dan memperkaya wawasan ilmu ekonomi Indonesia, mengenai biografi dan gagasan-gagasan Mubyarto tentang Perekonomian Indonesia.
- d. Bagi Masyarakat : Dapat memberikan informasi mengenai tokoh intelektual Indonesia dan pemikirannya.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian atau skripsi ini menggunakan pendekatan studi pemikiran tokoh yang menggunakan studi literasi (*study literary*) yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah pemikiran Mubyarto dari sumber buku-buku, jurnal dan sumber literasi lain yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Demi memperjelas permasalahan dan untuk mempermudah pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Pada setiap bab terdapat sub-bab sehingga dapat memudahkan untuk dipahami dan dimengerti.

Adapun isi dalam skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI KEMISKINAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori tentang kemiskinan yang memiliki korelasi dengan pemikiran Mubyarto yakni pengentasan kemiskinan.

BAB III BIOGRAFI DAN EKONOMI PANCASILA PEMIKIRAN MUBYARTO

Pada bab ini akan memaparkan biografi singkat Mubyarto, sejarah ekonomi pancasila dan pengentasan kemiskinan pemikiran Mubyarto.

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MUBYARTO TERHADAP KEMISKINAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis pemikiran Mubyarto terhadap pengentasan kemiskinan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan sekaligus saran dari penulis.

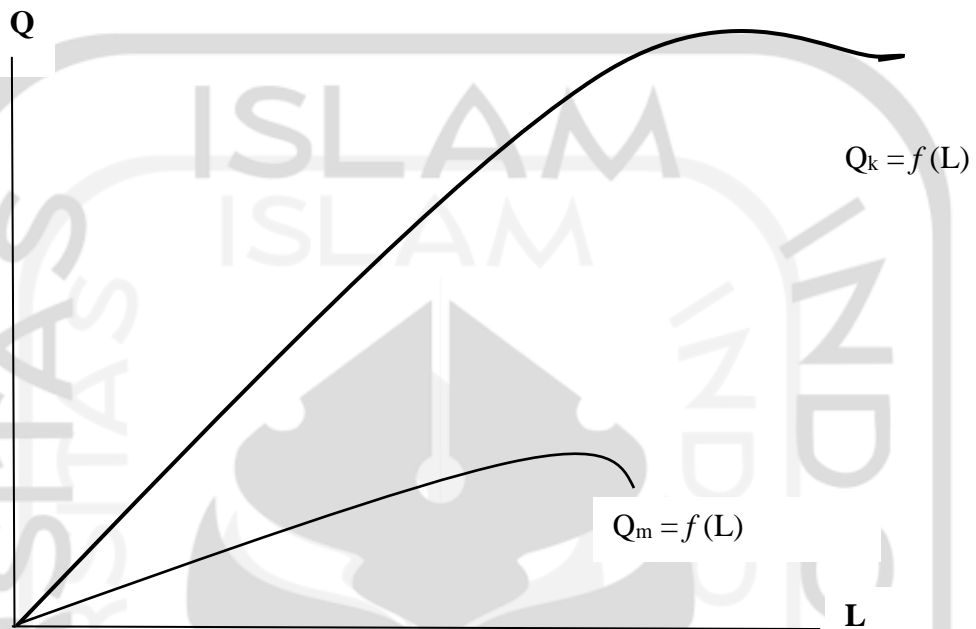
BAB II

TEORI KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Keterbatasan tersebut meliputi keterbatasan dalam pendapatan, kondisi kesehatan, keterampilan, penguasaan aset ekonomi hingga akses informasi (Todaro, 2006: 243). Pengukuran tersebut diukur dengan pendekatan moneter atau data pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, sedangkan batasan yang digunakan disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pengeluaran lebih kecil dari garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pemerintah menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dihitung dari Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) (Widjajanti, 2016: 2).

Setidaknya ada dua faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan seorang dalam produktivitas. Jika pendidikan dan kesehatan didapatkan secara layak oleh seorang atau kelompok, maka berpotensi dapat keluar dari garis kemiskinan. Pendidikan dapat menunjang kemampuan (*Skill*) seorang dalam mengelola sumber daya untuk lebih bernilai dan lebih efisien, begitu halnya dengan kesehatan dapat menunjang seorang bekerja lebih kuat dan efektif. Keduanya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Produksi Jangka Pendek



Tabel 1: Produksi Jangka Pendek

Q_k = Output yang dihasilkan dari SDM Kaya

Q_m = Output yang dihasilkan dari SDM Miskin

L_k = Lama waktu (kemampuan) kerja dari SDM Kaya

L_m = Lama waktu (kemampuan) kerja dari SDM Miskin

Kurva di atas menggambarkan kemampuan sumber daya manusia terhadap produktivitas yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang berbeda. Kurva Q_k melambung tinggi disebabkan karena faktor pendidikan dan kesehatan Q_k lebih unggul dibanding Q_m . Sehingga dapat mengakibatkan kemampuan output dan ketahanan/kemampuan kerja Q_k lebih baik. Hal ini juga berdampak terhadap pendapatan Q_k lebih tinggi karena produktivitas lebih tinggi dan kemampuan jam kerja lebih lama dibanding dengan Q_m yang produktivitasnya lebih rendah dan jam kerjanya lebih pendek.

2.1 Kemiskinan dari Perspektif Teori

2.1.1 Teori Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dipahami sebagai keadaan seorang atau kelompok kekurangan daya beli dalam menjamin keberlangsungan hidupnya. Kekurangan dan ketidakmampuan tersebut meliputi kebutuhan primer seorang seperti pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi yang di mana seorang atau kelompok tidak mampu menyelenggarakan hidupnya pada taraf yang dianggap manusiawi (Rah, dkk (2018)). Sebagaimana oleh Bank Dunia melaporkan kepada PBB terkait kemiskinan, bahwa untuk mengentaskan kemiskinan pembangunan manusia tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, akan tetapi lebih utama dan penting ketika memperhatikan aspek pendidikan secara umum. Pendidikan dapat menunjang orang miskin untuk meningkatkan kehidupan sosialnya (Bank Dunia, 1990). Sedangkan BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang atau individu hidup layak yakni dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS, 2016).

Amartya sen mengungkapkan kemiskinan global yang dikenal dengan istilah *Developmen as Freedom*. Menurut Sen, kemiskinan dan kelaparan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, namun disebabkan oleh faktor strukturalis atau kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap kemiskinan masyarakat, misalnya dengan adanya kediktatoran pemimpin atau sistem suatu negara, yang berdampak terkekangnya masyarakat. Pandangan Sen terhadap kemiskinan agar dapat dituntaskan yakni harus mengutamakan kebebasan sebagai instrumen utama dalam

pembangunan. Kebebasan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk demokrasi, hal tersebut menurut Sen adalah faktor kunci dalam memerangi kemiskinan (Sen, 1981). Sehubungan dengan kebebasan, Sen mendasarkan atas dua peran yaitu: peran konstitutif dan peran instrumen. Peran konstitutif merupakan pembangunan yang mengacu pada pentingnya kebebasan dalam menentukan dan meningkatkan kehidupan manusia, peran instrumental dalam pembangunan lebih menekankan pada sarana-sarana untuk mencapai kebebasan (Sen, 1999:30)

Kemiskinan dalam perspektif strukturalis dependensia menyebutkan bahwa keterbelakangan perekonomian negara berkembang dikarenakan adanya eksploitasi oleh pihak asing, hal ini akibat dari hubungan ekonomi yang tidak adil (Sritua, 1981). Menurut Thee Kian Wie bahwa liberalisme, kemiskinan dan ketergantungan merupakan suatu keadaan yang terjadi disemua negara berkembang. Baginya, kemiskinan dan ketergantungan dapat menyebabkan penurunan SDM, pada akhirnya berdampak terhadap penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat (Kwik Kian Gie, 1995). Sebagaimana yang terjadi di Amerika Latin setelah ECLA atau komisi PBB untuk Amerika Latin melakukan penelitian untuk mencari akar dari ketergantungan dengan berkesimpulan bahwa sumber eksploitasi tersebut adalah Amerika Serikat.

Ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara berkembang menurut Raul Presbich disebabkan karena liberalisme yang menggunakan konsep pembagian kerja internasional. Pada prakteknya dengan adanya konsep keunggulan komparatif, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketergantungan negara miskin kepada negara yang lebih kaya.

Selama suatu negara tidak melakukan perubahan terhadap ketergantungan sebagaimana menurut Raul Presbich dengan melakukan industrialisasi maka akan selalu dalam bayangan eksploitasi. Industrialisasi menurutnya dapat membantu daerah pinggiran agar tidak bergantung terhadap impor dengan memproduksi dalam negeri. Tentu perlu adanya peran perlindungan dari pemerintah baik dengan adanya subsidi maupun pengembangan yang lain (Baran, 1957).

Sedangkan konsep kemiskinan dalam Al-Quran memiliki beberapa istilah, ada dua kata yang secara umum dapat dikategorikan kemiskinan yakni faqir dan miskin. Sebagaimana pendapat Abu Yusuf pengikut Imam Abu Hanifah menafsirkan fakir miskin yakni seorang yang sangat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang primer antara lain makanan, minuman. Sedangkan yang didefinisikan miskin adalah seorang yang hanya bisa memenuhi 70% kebutuhan primernya (Melis, 2019: 182). Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW yakni untuk menebarkan *rahmatan lil alamin*. Islam hadir untuk menyelamatkan dan menghidupkan keadilan dalam bentuk yang paling nyata. Keadilan tersebut diwujudkan dalam sikap (sunnah) Nabi Muhammad dalam kehidupan, Nabi mengecam terhadap perilaku monopoli atau penumpukan kekayaan dan praktek perdagangan yang tidak jujur. Al-Quran juga menyerukan agar tidak menghamburkan modal, akan tetapi menganjurkan penggunaan modal agar dapat keuntungan dan melarang menyia-nyiakannya (Asghar, 2009).

Pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan golongan atas dan tidak adanya pemerataan ekonomi bagi masyarakat banyak adalah bentuk kezaliman. Hal tersebut pernah terjadi salah satu masa kekhalifahan Islam, di mana kebijakan

ekonomi hanya menguntungkan golongan pemerintahan dengan mengabaikan kepentingan rakyat, yang berdampak kepada kesengsaraan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Semasa modern pernah terjadi di asia dengan mengalami masa pemerintahan yang diktator dalam kebijakan publik, seperti rezim Soeharto di Indonesia, Marcos di Phillipina, dan Lee Kuan Yew di Singapura (Asghar, 2009: 92).

Pemahaman mengenai kemiskinan termasuk bagaimana mengukur kemiskinan terus mengalami perkembangan. Seperti halnya mengenai kemiskinan di wilayah pedesaan, kemiskinan merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi seseorang yang terperangkap. Di lingkungan pedesaan seringkali mereka kesulitan untuk keluar dari klaster kemiskinan, hal ini didefinisikan sebagai klaster relatif miskin karena kemiskinan yang dialami bergantung terhadap distribusi pendapatan dan pengeluaran masyarakat.

2.1.2 Produksi Jangka Pendek

Kemiskinan dari sisi teori dapat didekati dengan teori produksi jangka pendek, secara definisi produksi merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu hasil (*output*) dari proses input. Produksi merupakan kombinasi dari faktor-faktor produksi yang dapat menghasilkan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai guna. Sedangkan produksi jangka pendek merupakan proses meningkatkan *output* produksi dengan menambah faktor variabel dalam kurun waktu tertentu. Jadi, dalam kurun waktu tersebut output dapat ditingkatkan dengan mengubah atau menambah faktor produksi variabel. Misalnya, jika produksi ingin ditingkatkan outputnya (jumlah produksinya) dalam jangka pendek, maka dapat dilakukan

dengan menambah tenaga kerja atau menambah/meningkatkan jam kerja, yakni untuk jangka pendek peralatan mesin (*capital*) tidak ditambah.

Variabel *L* (*labor*) dalam fungsi produksi jangka pendek sangat berpengaruh dalam meningkatkan *output*, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bertambahnya *labor* (kuantitas) dalam produksi jangka pendek dapat meningkatkan *output*, begitu halnya *labor* (kualitas) akan meningkatkan efisiensi dalam produktivitas. Kemampuan SDM dengan kualitas lebih unggul yang disebabkan oleh faktor pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dapat berpengaruh terhadap meningkatnya *output* dan efisiensi waktu yang dibutuhkan dalam sebuah produksi.

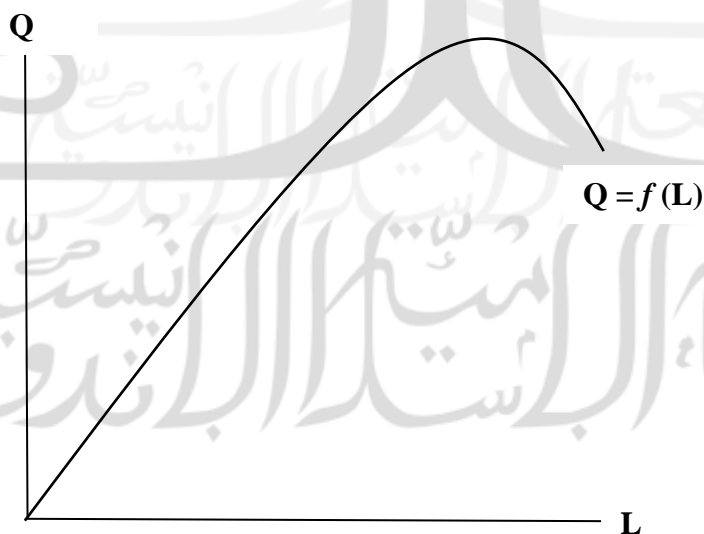
Keunggulan SDM yang disebabkan oleh faktor pendidikan dan kesehatan yang baik dapat berpengaruh terhadap Produksi Jangka Pendek dengan kemiskinan. Kemampuan produktivitas seorang terhadap Produksi Jangka Pendek dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang berbeda, akan berdampak terhadap *output* produksi tersebut. Baik secara kuantitas maupun efisiensi waktu produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output*.

2.1.2.1 Produksi Total

Produk total merupakan keseluruhan dari semua hasil produksi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Hasil produksi total dapat berubah sesuai dengan banyaknya faktor variabel yang digunakan dalam produksi. Kurva yang dapat menunjukkan perubahan tersebut yakni hubungan antara Produksi total dengan satu Produksi Variabel (bertambahnya tenaga kerja). Kurva tersebut disimbolkan sebagai berikut : $TP=f(X)$

TP merupakan output total atau jumlah produksi total, misalnya, jika hanya ada satu faktor atau satu macam input variabel yang digunakan seperti Tenaga Kerja atau *Labor* maka dituliskan sebagai berikut : $Q=f(L)$. Sedangkan Q merupakan tingkat output sedangkan L merupakan jumlah tenaga kerja atau jam kerja yang dibutuhkan dalam produksi, sehingga kedua fungsi tersebut dapat digambarkan dalam kurva produksi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kurva Produksi Total



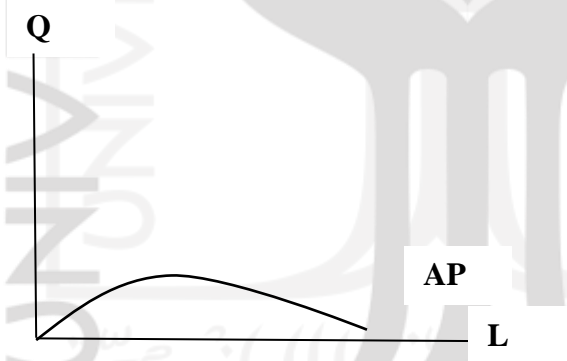
2.1.2.2 Produksi Rata-rata

Produksi Rata-rata atau AP (*Average Produk*) merupakan jumlah produksi yang dihasilkan dari beberapa faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut.

$$AP = Q:L$$

Produksi Rata-rata adalah jumlah rata-rata produksi (*output*) yang dihasilkan oleh tenaga kerja. **Q** merupakan jumlah (*output*) yang dihasilkan dalam produksi, sedangkan **L** merupakan tenaga kerja yang digunakan dalam produksi, dapat digambarkan pada kurva sebagai berikut :

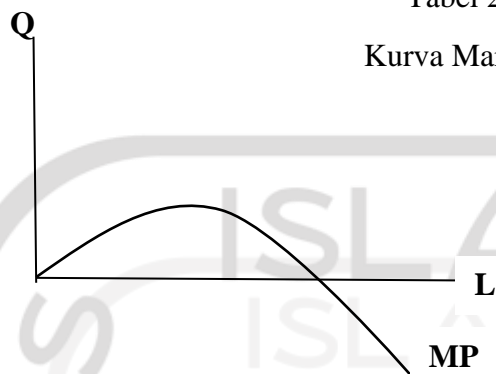
Tabel 2.3
Kurva Produksi Rata-rata



2.1.2.3 Produksi Marginal

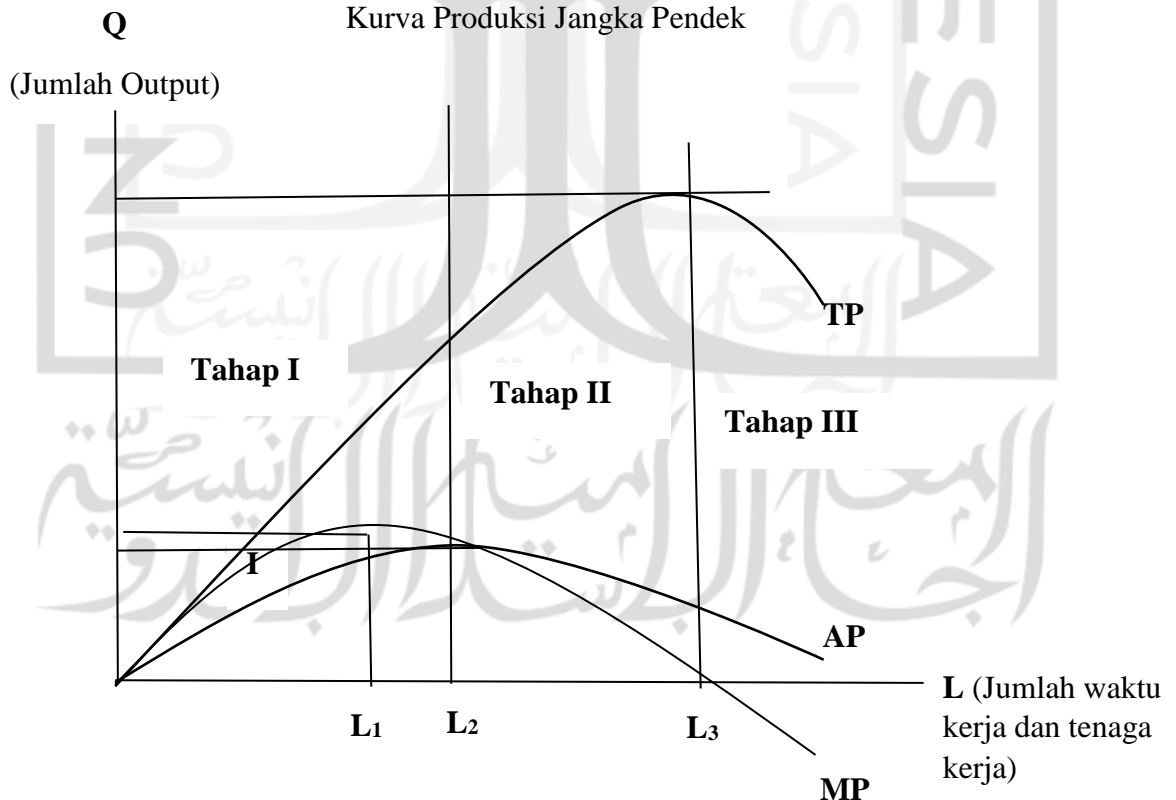
Marginal Product atau Produksi Marginal (MP) merupakan bertambahnya hasil produksi yang disebabkan karena bertambahnya faktor produksi variabel (tenaga kerja).

Tabel 2.4
Kurva Marginal



Kurva di atas dapat dijelaskan bahwa proses produksi yang ditambah dengan satu (*input*) variabel yakni *input* faktor produksi variabel (tenaga kerja) ditambah secara terus menerus maka *output* komoditas yang dihasilkan semakin menurun, karena *fixed* variabelnya (moral/mesin) bersifat tetap, atau dikenal dengan istilah *The Law Of Diminishing Return*. Secara keseluruhan Produksi Jangka Pendek dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kurva Produksi Jangka Pendek



Kurva di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses produksi jangka pendek. Tahap pertama, input variabel (tenaga kerja) terdapat keseimbangan dengan *output* yang dihasilkan, tahap kedua, ditambahkan *Labor* (L_2) mengakibatkan peningkatan Q (*output*) yang dihasilkan, tahap ketiga merupakan puncak saat semakin ditambahkan *Labor* (L_3) yang mengakibatkan produktivitas (*output*) menurun karena tidak seimbang antara *Labor* dengan efektivitas produksi. **MP** mengalami penurunan karena semakin ditambahkan *Labor* ke titik maksimum yang mengalami penurunan produksi.

2.2 Klasifikasi dan Indikator Kemiskinan

Klasifikasi kemiskinan secara umum terdapat dua jenis, yakni antara kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kondisi kemiskinan absolut yakni ketidakmampuan seorang dalam memenuhi kebutuhan primer (*Basic Need*) atau pokok minimum seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kebutuhan pokok tersebut dapat diukur dengan kemampuan dalam keuangan, jika dibawah minimum maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif yakni kemiskinan yang penghitungannya berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah, kemiskinan ini dikatakan relatif karena pendapatan antar lapisan sosial yang berbeda (Sumodingrat 1999:81).

Hingga saat ini pengukuran dan indikator-indikator mengenai kemiskinan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pengambil kebijakan. Bagi ekonom tradisional, indikator yang digunakan dalam mengukur kemiskinan berdasarkan moneter, yakni kemampuan daya beli, pendapatan maupun konsumsi.

Pengukuran basis moneter, mendefinisikan kemiskinan ketika seorang dengan pendapatan dibawah dibawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dengan basis moneter mulai mendapat kritik dari para akademisi, karena dianggap kurang realistis (Sen, 1981; 2000).

Perkembangan dalam penelitian mengenai kemiskinan bisa dilihat dengan munculnya konsepsi baru seperti analisis mengenai kemiskinan multidimensi. Konsep tersebut mulai berkembang dari akademisi hingga pengambil kebijakan di tataran negara hingga internasional. *United Nation Development Program* (UNDP) mulai memperkenalkan konsep multidimensi pada tahun 2010 dengan cakupan keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup (UNDP, 2010). Konsep tersebut mengacu dari studi yang dilakukan oleh Santos dan Alkire tentang *Multidimensi Poverty Index* (MPI). Pengembangan konsep kemiskinan multidimensi yang dilakukan tersebut menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya persoalan rendahnya daya beli, pendapatan dan konsumsi masyarakat, namun mencakup dimensi yang lebih luas.

Berkembang pendekatan kemiskinan multidimensi (*Multidimensional Poverty Index/MPI*) dalam jangkauan analisisnya, yakni dapat menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga maupun individu melalui tiga dimensi yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang masing-masing terdiri dari dua indikator untuk dimensi kesehatan dan pendidikan, sedangkan dimensi standar hidup terdapat enam indikator, sebagai berikut :

- a. Pendidikan.
 - Kehadiran dalam pendidikan
 - Lama sekolah
- b. Kesehatan
 - Tingkat kematian bayi
 - Gizi/Nutrisi
- c. Standar Hidup
 - Kepemilikan aset
 - Kondisi dan luas lantai rumah
 - Air bersih
 - Sumber penerangan
 - MCK atau sanitasi
 - Bahan bakar untuk memasak (UNDP, 2010).

Pendekatan Multidimensi memiliki pengukuran yang terdiri dari beberapa dimensi yang setiap dimensinya memiliki garis kemiskinan masing-masing dengan ambang batas ganda. Sedangkan ukuran beserta kriteria kemiskinan menurut pemerintah Indonesia dalam menentukan rumah tangga miskin dengan menggunakan 14 variabel untuk mengategorikan suatu rumah tangga miskin.

1. Luas bangunan
2. Jenis lantai
3. Jenis dinding
4. Sumber air minum
5. Fasilitas buang air besar

6. Sumber penerangan
7. Jenis bahan bakar untuk memasak
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Frekuensi membeli daging, ayam dan susu dalam seminggu
10. Jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun
11. Akses ke puskesmas atau poliklinik
12. Akses ke lapangan pekerjaan

Pendidikan terakhir kepala rumah tangga, dan kepemilikan beberapa aset (Widjajanti dkk, 2016).

Persoalan kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, namun dibahas lebih luas atau lebih dikenal dengan kemiskinan pendapatan. Selama ini kemiskinan lebih dibahas dalam konsepsi dan konteks ekonomi yakni dengan istilah ketidakcukupan individu terhadap pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti Sandang, Pangan, Papan, pendidikan, perumahan dan kesehatan. Namun menurut Bank Dunia memiliki konsepsi kemiskinan yang lebih luas, tidak hanya persoalan pendapatan saja namun dengan mendefinisikan sebagai berikut :

“Kemiskinan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan lapangan pekerjaan, kehilangan keluarga (anak) yang disebabkan karena ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah bentuk ketidakberdayaan dan kurangnya keterwakilan dan kebebasan”

(Nanga, Muana dkk, 2018:8).

Secara umum pemerintah Indonesia membedakan dua konsep garis kemiskinan, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin adalah yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sedangkan definisi dari kedua konsep Garis Kemiskinan tersebut yakni :

- a. Garis Kemiskinan Makanan (GKM), jika pengeluaran kebutuhan minimum makanan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili sebanyak 52 jenis komoditi (telur, susu, sayuran, minyak dan lemak, ikan, padi-padian dll).
- b. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), merupakan kebutuhan minimum masyarakat untuk sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data utama yang digunakan dalam perumusan tersebut adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistika.

Rumus Penghitungan : $GK + GKM + GKNM$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Teknik penghitungan yang digunakan untuk Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebagai berikut :

- Pertama, menentukan kelompok populasi penduduk yang berada di Garis Kemiskinan Sementara (GKS) sebesar 20%. Penduduk ini didefinisikan sebagai kelas marginal dengan penghitungan GKS berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi tersebut kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (gkm) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil di konsumsi oleh penduduk referensi atau disetarakan dengan sebanyak 2100 kilo kalori per kapita per hari.
- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah penjumlahan nilai kebutuhan minuman dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis ini (barang dan jasa non makanan) mengalami perkembangan dan penyempurnaan setiap tahunnya dengan disesuaikan perubahan pola konsumsi penduduk (BPS, 2020).

Cakupan yang dinilai sebagai seorang dikategorikan sebagai penduduk miskin atau dalam garis kemiskinan internasional yakni mereka yang hidup di bawah pendapatan riil minimum tertentu. Batasan minimum tersebut digambarkan dalam pendapatan atau dalam bentuk moneter untuk mengukur penduduk miskin dengan asumsi ketika pendapatan seorang kurang dari Rp.472.525/kapita/bulan (BPS, 2021).

Secara global, ukuran dan kriteria kemiskinan menurut *United Nation Development Program* (UNDP) yang sejak tahun 1990 mengeluarkan laporan mengenai pembangunan manusia di berbagai negara yakni *Human Development Report*. Tolak ukur atau indeks kemiskinan manusia yang diperkenalkan yakni (*Human Proverty Index/HPI*) yang didefinisikan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Dalam pendekatannya HPI menggunakan data kekurangan atau derivasi agregat suatu negara terhadap tiga dimensi, namun HPI tidak dapat mengidentifikasi secara individu atau rumah tangga miskin.

2.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Selain konsep di atas juga terdapat kemiskinan dengan konsepsi dan faktor lain, seperti : a) Kemiskinan alamiah, b). Kemiskinan Struktural, c). Kemiskinan Kultural. Kemiskinan alamiah didefinisikan sebagai kemiskinan yang terjadi karena faktor alam dan geografis yang tidak mendukung untuk seorang lebih produktif dalam sektor pertanian, misalnya karena tanah gersang dan sumber daya alam terbatas. Kemiskinan Struktural yakni kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan pemerintah yang tidak menyentuh lapisan masyarakat secara menyeluruh, misalnya Urbanisasi namun masih tetap tingginya kemiskinan di pedesaan. Sedangkan Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena faktor sosial kultural dalam masyarakat, yang terperangkap dalam lingkaran sosial tersebut yang seolah sudah menjadi budaya masyarakat (Nanga, Muana dkk, 2018:9).

Tujuan pembangunan yang mendasar yakni kesehatan dan pendidikan, keduanya merupakan hal yang penting dalam mencapai pembangunan yang efisien. Kesehatan merupakan inti daripada kesejahteraan masyarakat, sedangkan pendidikan adalah perihalnya pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan lebih berharga. Kesehatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen utama dalam pembangunan dan pertumbuhan (Todaro, 2006:435).

Pendidikan yang didapatkan masyarakat terutama yang ada di negara berkembang sangat membantu dalam hal ekonomi, meskipun banyak faktor yang bersifat non pasar (non-ekonomis) yang memengaruhi, namun secara umum dapat dinilai atau dipandang sebagai tolak ukur pengaruh kuatnya permintaan dan penawaran. Sektor-sektor modern hingga saat ini masih menjadi pertimbangan bahwa tingkat pendidikan dapat mendorong untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan di sektor modern (Todaro, 2006:454). Terdapat banyak pandangan dan identifikasi mengenai penyebab kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Ada beberapa kelompok ahli berpandangan mengenai penyebab kemiskinan antara lain. *Pertama*, kelompok pandangan ekonomi politik. Kelompok ini berpandangan bahwa muara dari kemiskinan di pedesaan merupakan dampak dari proses konsentrasi kekayaan dan kekuasaan terhadap segelintir orang saja. Konsentrasi tersebut terjadi dalam tiga tingkatan : a) Tingkat Global, munculnya kemiskinan yang diakibatkan karena hubungan antara pertukaran dan eksploitatif dan tidak seimbang antara negara miskin dan negara kaya, sehingga negara yang miskin tetap miskin, meskipun mendapat investasi dan manfaatnya; b) Tingkat Nasional, munculnya kemiskinan yang diakibatkan karena ulah beberapa kelompok elit

perkotaan/ibu kota yang berpendapatan tinggi, begitu juga dengan kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa; dan c) Tingkat Lokal, kemiskinan yang diakibatkan karena ulah kelompok elit lokal yang terdiri dari tuan tanah, birokrat yang mementingkan golongan dan pribadinya, pedagang, dan pelepas uang (*money lender*).

Kedua, kelompok dari pandangan ekologi. Kelompok ini melihat kemiskinan yang terjadi di pedesaan diakibatkan karena tekanan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali atas lingkungan dan sumber daya produktif. Tekanan penduduk tersebut menjadikan usaha dan lahan pertanian menjadi sempit yang berdampak kepada upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat dengan konsekuensi lain terpaksa harus bermigrasi ke perkotaan. Para ahli ekologi juga menilai bahwa kelompok miskin memiliki identik seperti kurang gizi, perumahan yang kurang layak, lingkungan yang kurang sehat dan iklim yang tidak menentu di pedesaan (Chambers, 1983).

Dari pendapat para ahli dapat dikelompokkan faktor penyebab kemiskinan sebagai berikut :

- a. Faktor kondisi alam dan lingkungan, yakni distribusi sumber daya yang tidak merata, meningkatnya kerusakan lingkungan dan bencana alam yang sering terjadi.

- b. Faktor penduduk, yakni meningkatnya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan mengharuskan untuk migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan.
- c. Faktor eksploitasi antar kelas, antar kelompok, antar wilayah, dan antar negara seperti adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara berkembang dan negara maju.
- d. Faktor teknologi, teknologi sangat penting untuk mempermudah dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor termasuk pertanian yang merupakan sektor utama pedesaan dan negara berkembang. (Chambers, 1983)
- e. Faktor kelembagaan dan struktural seperti halnya dengan adanya kebijakan pemerintah yang tidak menyentuh masyarakat pedesaan.

2.4 Strategi Penurunan Kemiskinan

Selain Mubyarto, terdapat berbagai pakar mengemukakan kebijakan untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan yang dianggap dapat menjinakkan kemiskinan hingga ketimpangan yang terjadi di negara berkembang, seperti halnya yang dikemukakan oleh Nafziger dalam bukunya yang berjudul *Economic Development* sebagai berikut :

- a. Perlu adanya reformasi agraria dan redistribusi lahan terutama di negara berkembang. Karena ketersediaan lahan subur semakin berkurang dibarengi dengan bertambahnya penduduk pedesaan.
- b. Permodalan dan perkreditan. Sumber modal dan jaminan selalu menjadi persoalan utama kelompok miskin untuk pengembangan usaha. Penting adanya

program yang dapat memudahkan baik persyaratan atau prosedur bagi kelompok miskin untuk mendapatkan modal, seperti halnya program di Bangladesh yakni Grameen Bank.

- c. Kebijakan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, ini merupakan investasi sumber daya yang penting untuk menghasilkan kekuatan dalam jangka panjang. Pendidikan gratis merupakan salah satu cara penting untuk mendistribusikan sumber daya manusia terhadap kelompok masyarakat miskin agar semakin berkembang baik (Nafziger, 2005).

Namun konsep yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith dalam menghadapi kemiskinan lebih menekankan kepada transfer langsung kepada kelompok masyarakat dan subsidi lebih efektif, tentu dengan beberapa persyaratan. *Pertama*, jika sumber daya terbatas maka dapat dipastikan dapat subsidi dan transfer langsung bisa diterima oleh mereka yang membutuhkan. *Kedua*, penerimaan bantuan lebih diprioritaskan terhadap pembangunan aset pendidikan yang dapat menunjang agar tidak terjadi kemiskinan berlanjut (Todaro dan Michael, 2015).

Konsep lain tentang kemiskinan dipaparkan oleh Hikmat, 2004. Bahwa pendekatan pembangunan yang berpusat kepada rakyat akan lebih efektif, dengan menjalankan kebijakan desentralisasi dalam menangani persoalan sosial terutama kemiskinan. Pendekatan tersebut dapat menjadi prioritas karena pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal dengan melakukan kontrol terhadap sumber daya materi dan nonmateri (Hikmat,

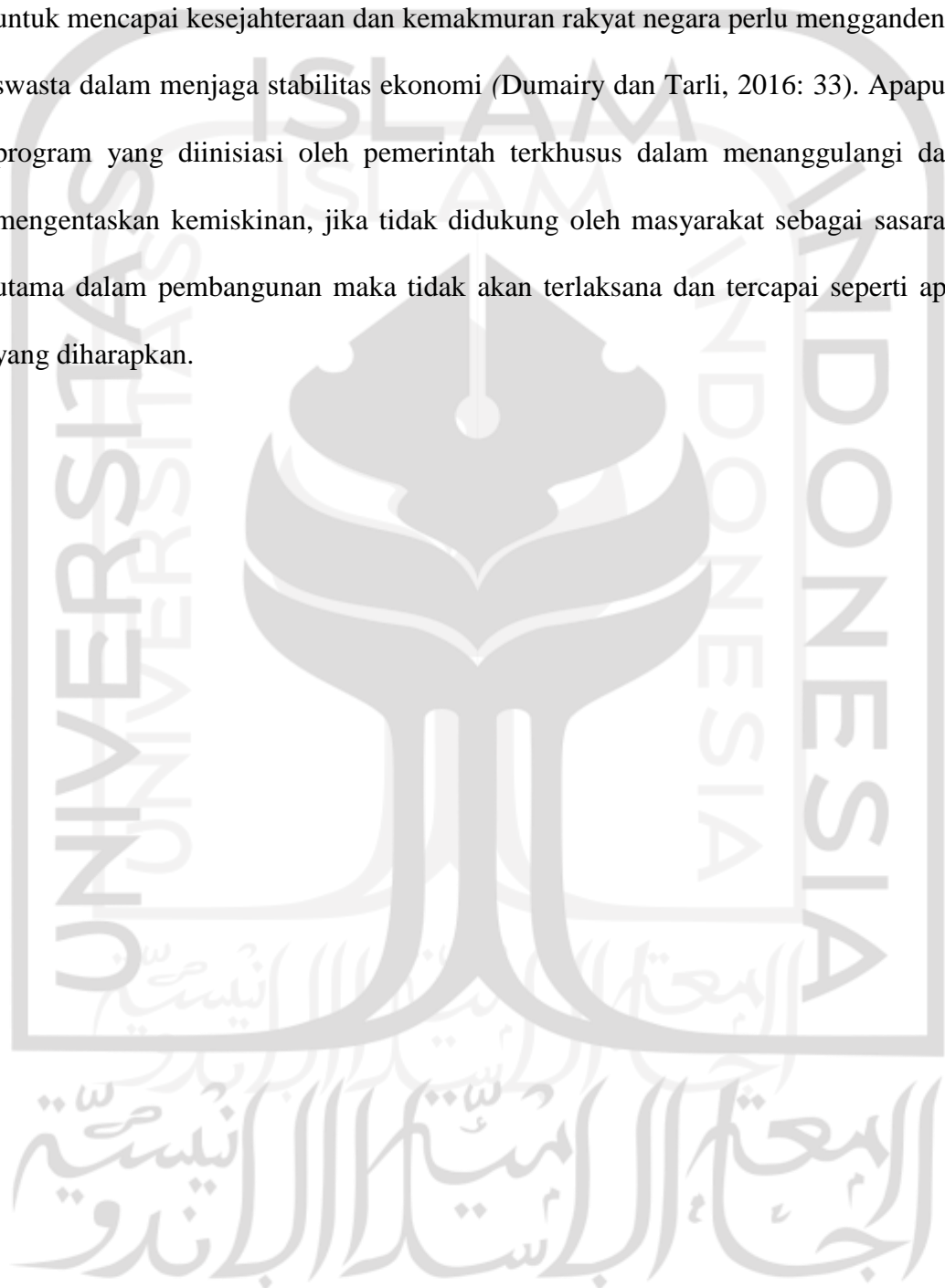
2004: 15-16). Ada tiga dasar yang dianggap dapat melakukan perubahan-perubahan struktural ketika pembangunan berpusat pada rakyat.

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan yang dapat mendorong usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah mereka di level individu, keluarga dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur yang berfungsi menurut kaidah sistem organisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisir berlandaskan pada kaidah kepemilikan dan pengendalian.

Dengan demikian pembangunan yang berpusat pada rakyat dianggap lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Meskipun pengembangan tersebut bersifat inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan, karena mereka adalah tujuan dalam proses pembangunan tersebut. Menurut Hikmat pembangunan masyarakat dianggap penting karena pertimbangan, 1). Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif, 2). Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat lebih baik jika dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari pemerintah, 3). Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan dari berbagai sikap masa bodoh dari individu dalam masyarakat, 4). Proses pemberdayaan yang kuat merupakan pondasi dari kekuatan bagi masyarakat (Hikmat, 2004:81).

Peranan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian perlu diimbangi dengan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, agar tidak

menyebabkan etatisme yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Meski dalam pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian dikuasai negara, namun untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negara perlu menggandeng swasta dalam menjaga stabilitas ekonomi (Dumairy dan Tarli, 2016: 33). Apapun program yang diinisiasi oleh pemerintah terkhusus dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan, jika tidak didukung oleh masyarakat sebagai sasaran utama dalam pembangunan maka tidak akan terlaksana dan tercapai seperti apa yang diharapkan.



BAB III

BIOGRAFI DAN EKONOMI PANCASILA PEMIKIRAN MUBYARTO

3.1 Riwayat Hidup Mubyarto

Mubyarto dilahirkan dari pasangan orang tua bernama Martodinoto dan Sumirah, pada tanggal 3 september 1938 di Desa Demak Ijo Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta. Ia merupakan anak ke 7 dari 8 bersaudara, oleh orangtuanya diberi nama Mubyarto dengan maksud agar anaknya bisa menjadi Cahaya yang terang bagi keluarga dan masyarakat, atau dalam istilah jawa yakni *Byar*. Awal pendidikan formal Mubyarto dimulai saat usia 5 tahun ketika masuk Sekolah Rakyat, meski semasa kecil prestasinya biasa saja namun minat bacanya sudah mulai tumbuh ketika masuk kelas 6 SD. Beliau menyelesaikan Sekolah Dasar di Demak Ijo hingga tahun 1950, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMP 3 Yogyakarta hingga tahun 1953. Setelah lulus dari SMP, Mubyarto masuk ke SMA 1 BOPKRI Yogyakarta hingga lulus pada tahun 1956 (Dumairy dan Tarli, 2016: 82).

Mubyarto dibesarkan dalam lingkungan desa yang mayoritas masyarakatnya adalah petani, dengan latar belakang tersebut turut mengilhami Mubyarto untuk mengambil jurusan Agraria ketika masuk perguruan tinggi. Bagi orangtuanya pendidikan penting untuk masa depannya, semasa masih bersama orangtuanya, Mubyarto dididik untuk terus rajin belajar dan disiplin agar menjadi orang berhasil. Mubyarto diterima jurusan Agraria Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta di tahun yang sama setelah lulus SMA, semasa

menjadi mahasiswa ia sempat diangkat sebagai asisten dosen dari Profesor Amerika. Tidak lama setelah menjadi asisten dosen kemudian Mubyarto bersama Ace Partadiredja berangkat ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan ke Vanderbilt University berkat beasiswa yang mereka dapatkan (Dumairy dan Tarli, 2016: 208).

Setelah mendapatkan gelar master yang diraih di Vanderbilt University pada tahun 1962, Mubyarto melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi yakni Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian di Iowa State University Amerika. Ia mampu menyelesaikan masa studi Doktornya selama tiga tahun dengan disertasi berjudul *“The Elasticity of the Marketable Surplus of Rice in Indonesia : A Study in Java-Madura”*. Dengan promotor Prof. Lehman. B Fletcher. Mubyarto meraih gelar Doktor saat usia 27 tahun (Dumairy dan Tarli, 2016: 74). Di usia yang sama juga ia melangsungkan pernikahannya dengan Hartati pada tahun 1965 setelah berkenalan tujuh tahun lamanya, hingga akhir hayat Mubyarto dikaruniai empat orang anak serta enam cucu.

Mubyarto pernah menjadi bagian dari pemerintah semasa Orde Baru, meski rezim Soeharto sempat menolak pemikiran Mubyarto, namun karena kedekatannya dengan Ginanjar Kartasasmita sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua BAPPENAS pada tahun 1993-1998 ia diminta menjadi bagian dari BAPPENAS untuk merumuskan sebuah program dalam menangani kemiskinan. (Dumairy dan Tarli, 2016: 209). Sebelum menjadi bagian dari Pemerintah, Mubyarto sempat menjadi anggota MPR RI. Pada waktu itu ia sempat menjadi Tim untuk perubahan amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya tidak

bisa menerima dengan menyatakan sikap *walk-out*. Karena sebagian besar anggota parlemen akan menyetujui perubahan UUD yang secara prinsip akan mengubah arah perjuangan. (Dumairy dan Tarli, 2016: 205).

Di akhir usia Mubyarto, ia harus melawan penyakit jantung ringan dan paru-paru basah yang sudah lama menggerogotinya. Ia sempat dirawat selama 4 hari di RS Sardjito, namun takdir berkehendak lain. Mubyarto meninggalkan keluarganya dan teman seperjuangannya pada hari selasa 24 Mei 2005 pukul 13:49 Wib. Di hari berkabung tersebut tidak hanya dirasakan oleh keluarga besar UGM dan berbagai profesi memberi penghormatan kepada Mubyarto (Dumairy dan Tarli, 2016: 73).

3.2 Sejarah Ekonomi Pancasila

Secara historis, awal berkembangnya pemikiran Ilmu Ekonomi modern di perguruan tinggi di Indonesia bermula dari dua kampus besar yakni UI dan UGM. Ada perbedaan yang mencolok dari dua kampus tersebut dalam menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Amerika. UGM bekerja sama dengan Universitas Wisconsin yang lebih dikenal dengan Ekonomi Pertanian dan kelebagaannya, sedangkan UI bekerja sama dengan Universitas California di Berkley (Dumairy dan Tarli, 2016: 100).

Bagi Mubyarto, Pancasila merupakan ideologi yang dapat menangkal paham-paham asing yang dianggap selama ini telah menyengsarakan bangsa Indonesia. Di bidang ekonomi, ideologi Pancasila melahirkan sistem Ekonomi Pancasila yang bercirikan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Mubyarto menegaskan bahwa Ekonomi Pancasila bukanlah mimpi yang tidak mungkin

direalisasikan, namun dalam mencapai itu semua bangsa Indonesia harus bertekad untuk melaksanakan prinsip dan peranan tersebut disertai dengan semangat solidaritas sosial dan disiplin nasional yang tinggi (Mubyarto, 1982: 21).

Ekonomi Pancasila mulai berkumandang ketika Fakultas Ekonomi UGM menyelenggarakan seminar dalam rangka dies natalis kampusnya. Pada waktu itu ada 20 sarjana dan ada 19 artikel yang ditulis oleh peserta seminar, kemudian dibukukan dalam judul *Ekonomi Kerakyatan (1981)*. Mubyarto merasa keberatan jika Ekonomi Pancasila tersebut hanya dikaitkan dengan dirinya saja, karena sebagaimana awal muncul dikenalkan oleh Emil Salim pada tahun 1979 dengan tulisannya dalam jurnal ilmiah Prisma yang berjudul “sistem ekonomi sosialis pancasila” (Dumairy dan Tarli, 2016: 158). Seminar Ekonomi Pancasila yang diselenggarakan di FE UGM pada tahun 1980 dimotori oleh Mubyarto dan Boediono membahas dari berbagai sudut pandang oleh para sarjana dan kalangan lainnya. Pembahasannya tidak terbatas dalam Ekonomi Pancasila dalam lingkup sistem atau konsep, namun lebih mencakup konsep Ekonomi Pancasila sebagai gagasan ekonomi dan pembangunan (Dawam, 2004: 2).

Seminar yang diselenggarakan oleh Mubyarto bersama Boediono pada tahun 1980 tentang Ekonomi Pancasila di FE UGM dalam pembahasannya tidak hanya merespon Ekonomi Pancasila sebagai konsep atau sistem. Namun lebih mengarah kepada kritik, gagasan ekonomi, dan pembangunan melalui Ekonomi Pancasila (Dawam, 2004: 2). Secara historis dan konseptual pandangan Ekonomi Pancasila antara Mubyarto dan Emil Salim memiliki perbedaan, Emil Salim merumuskan konsep tersebut sebagai dasar untuk perekonomian semasa Orde Baru.

Sedangkan Mubyarto berlainan, yakni dengan memberikan kritik terhadap konsep ekonomi yang digunakan semasa Orde Baru (Neo-klasik) (Dumairy dan Tarli, 2016: 152).

Mubyarto memberikan definisi dalam bukunya Moral Ekonomi Pancasila, bahwa Ekonomi Pancasila adalah :

“Sistem ekonomi atau sistem perekonomian, tetapi berbeda daripada sistem Ekonomi Kapitalis, atau sistem Ekonomi Komunis. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, dan kegotongroyongan nasional. Kegotongroyongan nasional, bukan hanya kegotongroyongan di pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotongroyongan pada tingkat nasional” (Mubyarto, 1982: 8).

Mubyarto menilai, bahwa seringkali kalangan ekonom mencampurkan dua istilah antara ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. Menurutnya dua hal itu berbeda, ekonomi kerakyatan membicarakan konsep atau pemikiran, sedangkan ekonomi rakyat adalah pelaku ekonomi dari masyarakat (Dumairy dan Tarli, 2016: 157). Secara historis, ekonomi kerakyatan sudah ada sejak zaman penjajahan, Mubyarto mengoreksi pandangan sebagian kalangan karena menganggap Ekonomi Kerakyatan baru lahir setelah reformasi. Ekonomi Rakyat merupakan konsep yang membedakan antara Ekonomi yang berasal dari rakyat bawah dan Ekonomi Asing yang identik dengan kapitalis. Bagi Mubyarto ekonomi kerakyatan merupakan sub-sistem daripada sistem ekonomi Pancasila (Mubyarto, 2004f: 21).

Di Indonesia, ekonomi rakyat merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang bisa diandalkan namun sering kurang disadari. Ketika Indonesia

mengalami dinamika ekonomi, justru ekonomi rakyatlah yang menjadi pondasi dalam bertahan. Sejak terjadinya konglomerasi pada tahun 1980an banyak kalangan elit menganggap bahwa konglomerat lah dan bukan koperasi yang merupakan soko guru ekonomi nasional. Pada saat menghadapi krisis ekonomi ekonomi rakyat lebih kuat daya tahannya, sedangkan perusahaan besar sering keropos dan merepotkan pemerintah (Mubyarto, 2000: 63). Mubyarto merumuskan alternatif ilmu ekonomi baru yakni ekonomi Pancasila, yaitu ilmu ekonomi pasar yang dianggap populis, taat mematuhi kelima asas pancasila dan setia pada filsafat pancasila secara utuh yakni kekeluargaan dan gotong-royong (Mubyarto, 2004b: 7)

Penjelasan dari konsep ekonomi Pancasila tersebut dirumuskan Mubyarto menjadi tiga peranan, sila pertama dan kedua itu menjadi dasar, yakni moral dan kemanusiaan. Sila ke ketiga dan keempat merupakan tujuan, yakni merupakan metode kerja untuk mencapai sila kelima Sedangkan sila kelima merupakan tujuan dari pada semua sila yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Mubyarto, 2005b:33). Pendekatan moral yang dikembangkan Mubyarto sebagai inti dari perekonomian yang dianggap ideal dalam pembentukan Ekonomi Pancasila yakni ekonomi nasional yang membebaskan diri dari segala pengaruh dan karakter ekonomi kolonial (kapitalis) dan tidak menjadi alat eksploitasi bangsa atas bangsa (Mubyarto, 1982: 67).

3.3 Kemiskinan Pemikiran Mubyarto

3.3.1 Kemiskinan di Indonesia

Sejarah dan perkembangan bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem perekonomian, pada era Orde Baru telah mencoba berbagai teori pembangunan ekonomi yang dijadikan program prioritas yang belum pernah dilakukan oleh orde sebelumnya. Tahun 1967 merupakan awal perjalanan Orde Baru dalam menjalankan roda pemerintahan dengan usia negara yang sangat muda yakni 22 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak awal pemerintahan negara Indonesia hingga berakhirnya Orde Baru setidaknya sudah ada dua jenis perekonomian yang pernah digunakan di negara Indonesia. Seperti Ekonomi Terpimpin dan Ekonomi Liberal, meski dari masing-masing keduanya memiliki kelemahan dan keunggulannya. Kekurangan dari keduanya adalah, sifatnya terlalu sentralistik atau komando, sedangkan satunya bersifat terlalu liberal yang mengakibatkan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Maka dari itu Mubyarto mencoba untuk menyadarkan masyarakat sekaligus menawarkan alternatif bahwa Pancasila yang disepakati bersama sebagai dasar negara perlu dipertegas dan dijadikan rumusan perekonomian Indonesia (Mubyarto, 2002: 6).

Problem utama perekonomian di Indonesia bukan karena pengangguran, namun kemiskinan yang masih tinggi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa mencapai titik keseimbangan antara statistika dan realita yang dihadapi masyarakat. Mubyarto menilai bahwa pengangguran belum tentu miskin, namun ketika memandang kemiskinan sudah tentu di bawah standar hidup layak. Kritik Mubyarto terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia yang dijalankan

pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan dianggap belum menjalankan sepenuhnya amanat UUD 1945. Karena selama Orde Baru pembangunan didominasi oleh pembangunan fisik yang tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Tanpa diimbangi dengan SDM yang unggul tersebut maka pembangunan fisik (infrastruktur) hanya dinikmati golongan elit dan asing. Disebabkan dari pembangunan fisik yang tidak menguntungkan golongan bawah mengakibatkan ketimpangan sosial, sehingga kesejahteraan kurang dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi objek dalam pembangunan. (Puthut, 2016: 1).

Pembicaraan mengenai kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia terus menjadi perhatian akademisi. Mubyarto yang merupakan seorang ekonom menilai bahwa banyak sarjana ekonomi yang kurang tertarik pada penelitian persoalan kemiskinan, terutama kemiskinan yang ada di pedesaan. Gagasannya mengenai kemiskinan diungkapkan dalam buku *Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi dan Keadilan*, bahwa untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat tidak bisa hanya menggunakan pendekatan penelitian satu disiplin ilmu, namun perlu adanya kerja sama lintas disiplin ilmu agar menemukan korelasi dan jalan keluar. (Mubyarto, 1980: 1).

Gagasan Mubyarto mengenai Ekonomi Pancasila menekankan pada pemerataan, karena selama ini hanya bertumpu kepada angka pertumbuhan dan pembangunan yang tidak diimbangi dengan pemerataan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada waktu itu 3-4% namun rakyat bisa berpartisipasi penuh dan menikmati adanya pemerataan itu lebih baik. Daripada pertumbuhan 7% saat

krisis tetapi tidak merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Untuk mencapai pemerataan ke bawah tersebut diperlukan investasi yang masif di desa-desa, dengan kata lain sarbini menyebutnya sebagai aset dari pada alat-alat produksi, karena aset memiliki makna yang lebih luas seperti mesin-mesin, tanah, peralatan dll (Mubyarto, 1982: 59).

3.3.2 Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Mubyarto

Pemikiran Mubyarto dalam upaya menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan setidaknya melalui tiga hal utama yakni pentingnya kegotongroyongan bagi masyarakat Indonesia, peranan multidisiplin dalam penelaahan kemiskinan, dan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Ketiga konsep tersebut menurut Mubyarto dapat menjadi rumusan untuk pengentasan kemiskinan jika masyarakat mampu bertekad secara bersama dalam mewujudkan. Mubyarto menyatakan bahwa secara prinsip masyarakat harus memiliki kesediaan, yaitu kesediaan masyarakat dan seluruh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, yakni untuk perlu mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan (Mubyarto, 1980: 87).

Pertama, gotong-royong menurut Mubyarto merupakan salah satu praktik yang dapat diandalkan dalam mencapai cita-cita kesejahteraan bersama. Karena di dalamnya sama-sama memiliki hak dan persamaan kewajiban dalam menjalankannya, Mubyarto memberi istilah komunal namun berbeda dengan komune ala komunis, gotong-royong yang dimaksud memiliki nilai dan artian

kekeluargaan (Mubyarto, 1982: 92). Di lain sisi Mubyarto membedakan antara gotong-royong dan tolong menolong. Kalau gotong-royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama, sedangkan tolong-menolong lebih kepada menunjukkan pencapaian pribadi atau perorangan saja. Jadi konsep gotong-royong yang dijelaskan Mubyarto adalah upaya untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan secara bersama-sama (Mubyarto, 1981: 59).

Kedua, multidisiplin keilmuan dalam pengentasan kemiskinan yang dirumuskan Mubyarto, yakni dengan melakukan penelitian lintas disiplin keilmuan secara bersama. Salah satu pengalaman yang pernah dilakukan Mubyarto ketika menjadi ketua PERHEPI, ia merasakan dinamika yang terjadi ketika mengintegrasikan konsep interdisiplin. Kemudian dari pengalaman tersebut kemudian ia mampu merumuskan konsep transdisiplin bagi sebuah penelitian khususnya ilmu ekonomi dan ilmu sosial secara umum. Konsep transdisiplin menurut Mubyarto adalah setiap masalah tidak bisa ditangani hanya dengan satu ilmu saja, akan tetapi memerlukan ilmu-ilmu lain untuk merumuskan dan memecahkan masalah. Misalkan persoalan kemiskinan, pendekatan yang digunakan tidak hanya menggunakan ilmu ekonomi, akan tetapi perlu adanya pendekatan transdisiplin ilmu lain. Setidaknya ada empat bidang ahli yang harus dilibatkan, antara lain ahli politik, ahli sosiologi, ahli antropologi, dan ahli ekonomi (Mubyarto, 1982: 33)

Pendekatan metodologis keilmuan yang ditawarkan Mubyarto agar mampu merumuskan penyebab kemiskinan dan hasil yang lebih bermutu yakni dengan konsep multidisiplin. Karena untuk menemukan solusi suatu permasalahan tidak

bisa hanya menggunakan satu pendekatan (monodisiplin) saja, namun perlu keterlibatan banyak pihak lintas disiplin keilmuan untuk merumuskan konsep, teori hingga ke praksis yang solutif (Dumairy dan Tarli, 2016: 35). Untuk mencapai langkah pengajaran yang tidak hanya monodisiplin, Mubyarto memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan di setiap perguruan tinggi, berikut juga 4 jalur Reformasi menurut pandangan Mubyarto :

1. Universitas seharusnya membentuk pusat studi sesuai dengan disiplin ilmunya, untuk mempelajari dirinya, karena hal ini menyangkut dengan nilai universitas dan cara mengorganisir pengetahuan yang dapat melibatkan diri dengan masyarakat.
2. Universitas seharusnya mendirikan pusat studi untuk mempelajari kosmologi yang dapat membangun gambaran utuh mengenai dunia, serta menarik informasi yang dihasilkan dari masing-masing disiplin ilmu yang ada di Universitas.
3. Universitas seharusnya mendirikan pusat studi yang mempelajari krisis sosial dan krisis global, untuk mendorong penelitian penting yang berhubungan dengan tanggung jawab lembaga kepada masyarakat.
4. Jika konsensus tersebut dapat dicapai, maka universitas dapat mendirikan pusat-pusat studi transdisipliner yang dapat mengaitkan terhadap isu penting, yang kemudian dapat dikembangkan ke penelitian *Non*-disipliner (Mubyarto, 2005c: 17).

Metode pengajaran yang selama ini diterapkan oleh dosen yakni dengan mengajar di dalam kelas dan bahkan tidak sama sekali mahasiswa dilibatkan dalam

penelitian atau mengajar dengan penelitian (Mubyarto, 2005c: 13). Mubyarto menilai metode tersebut dianggap sudah tidak relevan serta kurang meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa terhadap lingkungan riil masyarakat. Menurutnya, mengajar dengan praktek penelitian dapat meningkatkan dan menjadikan setiap pertemuan dosen dan mahasiswa sebagai forum yang lebih hidup. Dengan pengajaran secara partisipatif tersebut, maka mahasiswa dan dosen adalah mitra belajar.

Selain itu Mubyarto juga menggunakan pendekatan transdisiplin yang merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu sosial non-ekonomi seperti sosiologi, antropologi dan ilmu politik dalam sebuah penelitian maupun untuk merumuskan jalan keluar masalah kemiskinan (Dumairy dan Tarli, 2016: 64). Konsep tersebut dianggap lebih relevan ketika digunakan mengentaskan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia. Metode dengan menggunakan lebih dari satu spesialisasi keilmuan, dianggap mampu merumuskan konsepsi jalan keluar yang lebih efektif bagi bidang ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, antropologi).

Ketiga, koperasi yang merupakan bentuk semangat dan berusaha bersama, dengan dasar kekeluargaan atau bekerja bersama sebagai prinsip utama yang perlu disadari dan dilakukan dalam menjalankan roda perekonomian. Semangat dalam usaha bersama tersebut yang mendasari koperasi dan bukan semangat bersaing (secara bebas) dalam membangun bersama. Meski dalam bekerjanya perekonomian haruslah ada persaingan namun perihal utama adalah semangat bersama untuk kesejahteraan bersama. Bagi Mubyarto koperasi adalah konsep yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terlebih untuk mengentaskan

kemiskinan, karena didasari atas kepemilikan, penentuan dan tanggungjawab bersama.

Penjelasan koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan, bahwa koperasi merupakan bentuk perusahaan negara dan perusahaan swasta, dalam koperasi wadah semangat berusaha bersama paling mudah direalisasikan. Meski ilmu ekonomi koperasi tidak mengutamakan persaingan bebas, namun Mubyarto juga berpendapat bahwa bersaing memang dapat mencapai efisiensi, akan tetapi bekerja sama juga akan menghasilkan efisiensi tinggi. Mubyarto menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi yang dianggap paling taat dan mematuhi jiwa dari kelima asas Pancasila serta setia pada filsafat Pancasila secara utuh yakni konsep koperasi atau ekonomi kekeluargaan (Mubyarto, 2004e: 18).

Mubyarto membedakan antara perusahaan/PT (Perseroan Terbatas) dan koperasi dalam menjalankannya. Perusahaan memperjuangkan kepentingan pesero yang menanamkan modalnya untuk mendapat deviden atau keuntungan, dengan menyerahkan pengelolaan kepada direksi dan tanggung jawab perseroan terbatas pada jumlah saham atau modal yang dimilikinya. Sedangkan koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang merasa sepenanggungan dan memperjuangkan kepentingan sosio-ekonomi yang sama dalam koperasi. Secara kolektif anggota koperasi melakukan usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (Mubyarto, 1982: 42). Mubyarto menegaskan bahwa pada praktiknya tergantung pada tujuan atau alat yang digunakan. Koperasi bisa saja salah pada penerapannya jika tidak memainkan perannya sebagai soko guru, sedangkan perusahaan bisa saja lebih baik jika menerapkan nilai pancasila dan mengutamakan asas kekeluargaan

atau usaha bersama. Mubyarto berpandangan bahwa tujuan utama dari koperasi adalah dengan menjiwai nilai pancasila, baik asas kekeluargaan maupun usaha bersama, tidak hanya menggunakan nama koperasi namun pada penerapannya jauh dari nilai tersebut (Mubyarto, 1982: 42).

Alasan Mubyarto meyakini bahwa koperasi merupakan konsep yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terlebih sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kebutuhan manusia (bangsa Indonesia) bukan hanya kebutuhan materiil saja, akan tetapi kebutuhan sosial (etik) juga menjadi bagian penting, karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup sendiri dan perlu kerja sama dan tolong-menolong (Mubyarto, 2004b:8).

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUBYARTO TERHADAP KEMISKINAN

4.1 Analisis Pemikiran Mubyarto

Pemikiran Mubyarto dalam upaya pengentasan kemiskinan yang pertama adalah gotong-royong, Mubyarto menilai konsep tersebut dianggap dapat menjadi sumber kekuatan terhadap pengentasan kemiskinan. Menurutnya, dengan usaha bersama anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan usahanya dapat mencapai kesejahteraan bersama. Dalam pandangan Mubyarto bangsa Indonesia memiliki budaya paguyuban yang mengakar dari masyarakat tradisional yang berada pada lapisan desa, dalam hal ini Mubyarto menilai harus dimanfaatkan dengan cermat oleh pemerintah Indonesia dalam merumuskan tatanan dan pelaksanaan ekonomi yang menyejahterakan (Mubyarto, 2004j: 10).

Mubyarto menilai bahwa Rumah Tangga (Masyarakat) Indonesia di lain sisi sebagai konsumen juga banyak rumah tangga yang menjadi Produsen dalam skala mikro. Bagi Mubyarto mereka adalah pelaku ekonomi rakyat yang membedakan dengan pelaku ekonomi besar (konglomerat) yang selama ini dianggap paling berjasa dalam pertumbuhan ekonomi negara (Mubyarto: 2004e :15). Bentuk usaha yang dimaksud Mubyarto adalah dengan adanya usaha secara gotong-royong dengan melakukan investasi bisa dari sumber-sumber dana sendiri. Modal usaha tidak selalu mengandalkan atau harus berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau perbankan. Namun masyarakat Indonesia dianggap dapat berinvestasi mandiri dan

dapat hidup secara sederhana sehingga merasa cukup kecukupan (Mubyarto, 2004e : 47).

Menurut Mubyarto apabila sumber program berasal dari pemerintah maka harus menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan (*Bottom-up*). Mubyarto berpandangan bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan dalam proses perencanaan serta penentuan target pelaksanaan. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemulihan untuk lebih baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini dianggap dapat menjadikan pembangunan secara merata, tidak hanya sektoral yang mengakibatkan adanya tumpang tindih dan semangat ego-sektoral (Mubyarto, 2005d: 21).

4.1.1 Analisis Penulis Tentang Gotong-royong

Pemikiran dari Mubyarto tersebut lebih bersifat general, sedangkan dalam masing-masing lapisan masyarakat memiliki klasifikasi masalah yang berbeda-beda. Sehingga perlu adanya identifikasi dari setiap kelompok masyarakat, agar program yang dicanangkan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu dalam merumuskan konsep usaha bersama di lingkungan masyarakat tentu memerlukan edukasi dan pendampingan. Tanpa adanya edukasi dan pendampingan masyarakat dalam mengelola sumberdaya secara kolektif maka sulit untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu sebagaimana diungkapkan oleh Todaro, bahwa pendidikan memiliki peranan yang penting dalam mengentaskan kemiskinan (Todaro, 2003).

Sebagaimana konsep gotong-royong yang diungkapkan oleh Koentjoroningrat dalam perspektif antropologi pembangunan yakni sebagai upaya pengerahan tenaga manusia untuk suatu usaha atau pekerjaan yang memiliki manfaat untuk umum. Gotong-royong dilakukan atas dasar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga seorang sedapat mungkin menjalin hubungan baik dengan sesama (Koentjoroningrat, 2002:62). Koentjoroningrat berpendapat bahwa gotong-royong dalam kehidupan modern tidak akan hilang, karena pada dasarnya manusia pasti memiliki teman karib yang merupakan kelompok primernya (Koentjoroningrat, 1998:155).

Mubyarto secara sepintas menjelaskan mengenai konsep gotong-royong, namun tidak merumuskan secara detail mengenai strategi hingga praksisnya dalam pengentasan kemiskinan melalui gotong-royong. Mubyarto lebih menekankan pada gotong-royong secara prinsip, namun tidak membahas bagaimana masyarakat bisa terbentuk secara gotong-royong. Sehingga masyarakat dapat saling bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat miskin yang majemuk, sehingga perlu adanya klasifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memetakan kondisi kemiskinan masyarakat yang beragam.

Mubyarto juga berpandangan bahwa masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan yang dianggap dapat lebih tepat sasaran dalam pembangunan. Menurut penulis dengan adanya pembangunan tersebut, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, seringkali kurang adanya pendampingan secara intensif. Sehingga program yang berakar dari masyarakat

hanya berlaku periode tertentu dan tidak berkelanjutan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan hingga tingkat kesehatan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan tersebut. Maka menurut penulis hal ini akan sangat kompleks dalam pengentasan kemiskinan sebelum mampu memetakan dan menyiapkan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemikiran gotong-royong dari Mubyarto tidak membahas secara teknis terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga menjadi hambatan tersendiri pada penerapannya. Termasuk dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan (*bottom-up*), apabila tidak ada pengawasan dan pendampingan secara intensif, maka program tidak berjalan dengan baik dan pengelolaan anggaran tidak terkontrol dengan baik. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap konsistensi program pembangunan terhadap pengentasan kemiskinan. Sebagaimana dalam melakukan produksi dibutuhkan pengorganisasian tenaga, modal hingga keterampilan produksi.

Pada dasarnya sejak dahulu kala manusia hidup berkelompok dan tentunya memiliki nilai kebersamaan masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh Kropotkin bahwa gotong-royong dibangun atas sifat jenius manusia dalam masyarakat. Ia mewarisi naluri saling mendukung dari perjalanan evolusinya, sehingga menimbulkan pengaruh hingga perkembangan manusia sampai saat ini (Kropotkin, peter: 2006).

Kedua, Mubyarto beranggapan bahwa masalah kemiskinan tidak bisa hanya ditangani oleh satu disiplin keilmuan saja, namun harus terdiri dari berbagai ilmu atau disebutnya sebagai pendekatan multidisiplin keilmuan. Pendekatan transdisiplin dan multidisiplin menurut Mubyarto adalah pendekatan yang dimulai dari satu disiplin ilmu, kemudian dapat melibatkan sesama disiplin ilmu maupun antar disiplin keilmuan. Akan tetapi dalam merumuskan dan menyelesaikan suatu kasus-masalah dibutuhkan kerja sama atau bantuan dari ilmu-ilmu yang lain (Mubyarto, 1982: 33). Sebagaimana pengertian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.154 tahun 2014 dijelaskan bahwa multidisiplin adalah strategi penelitian yang melibatkan setidaknya dua disiplin keilmuan untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama.

Multidisiplin keilmuan yang dimaksud Mubyarto dalam upaya pengentasan kemiskinan yakni dengan melakukan penelitian dari berbagai disiplin keilmuan secara kolektif. Dalam pengalamannya sewaktu melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan interdisiplin keilmuan, hasil dari penelitian tersebut dianggap kurang memuaskan sehingga dirumuskan konsep multi disiplin sebagai alternatif. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan lintas disiplin keilmuan secara bersamaan melakukan penelitian ke lapangan dengan merumuskan jalan keluar dan mengaitkan ilmunya dengan problem yang ada di masyarakat (Mubyarto, 2004c: 10).

Peranan multi disiplin dalam pengentasan kemiskinan dianggap penting dengan adanya integrasi dari berbagai pendekatan keilmuan. Jangkauan metode tersebut tidak hanya melibatkan disiplin ilmu sosial, namun juga ilmu eksakta

dianggap bisa dikombinasikan. Dengan menggunakan lebih dari satu spesialisasi keilmuan menurut Mubyarto dapat lebih komprehensif untuk mengidentifikasi persoalan kemiskinan dan merumuskan jalan keluar. Mubyarto menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi hingga merumuskan jalan keluar terhadap kemiskinan setidaknya ada empat bidang ahli yang harus dilibatkan, antara lain ahli politik, ahli sosiologi, ahli antropologi, dan ahli ekonomi kemudian secara bersama menyelesaikan masalah (Mubyarto, 1982: 33).

4.1.2 Analisis Penulis Tentang Multidisiplin Keilmuan

Keberhasilan multidisiplin terhadap pengentasan kemiskinan menurut Mubyarto adalah ketika mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan jalan keluar dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Namun dengan menggunakan multidisiplin untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan akan lebih luas dan kompleks, karena beragamnya faktor penyebab dan bentuk kemiskinan di berbagai daerah. Terlebih faktor utama penyebab kemiskinan adalah persoalan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendekatan multidisiplin sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi hingga merumuskan jalan keluar terhadap kemiskinan yang dirumuskan Mubyarto tidak sampai ke tahap praksis yang mampu merumuskan jalan keluar. Sehingga menggunakan multidisiplin yang dimaksud Mubyarto masih sangat kompleks dan general dalam penerapan di lapangan. Hal ini tentu membutuhkan proses yang panjang hingga menemukan simpulan yang bisa sesuai dengan masing-masing karakteristik dan problem yang dihadapi masyarakat terhadap kemiskinan.

Untuk mengidentifikasi agar lebih sederhana konsep multidisiplin yang dirumuskan Mubyarto, penulis menggunakan konsep ockham razor sebagai alat analisa. Ockham razor atau dikenal dengan pisau ockham merupakan prinsip yang dikenalkan oleh william ockham yang dapat digunakan dalam menganalisa. Ia merupakan seorang matematikawan dan filsuf inggris pada abad ke-14. Prinsip yang dikenalkan pada dasarnya membentuk kerangka berpikir dalam berpendapat agar lebih hemat atau memangkas pendapat analisa yang tidak perlu dan lebih sederhana. Pada penerapannya william ockham berpendapat bahwa seseorang sebaiknya berpendapat sesuai dengan porsinya, atau tidak berasumsi dari yang diperlukan. Meskipun ockham razor diberbagai jurnal seringkali digunakan dalam menganalisa disiplin ilmu sains atau forensik, misalnya dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien maka perlu disampaikan dengan sifat hemat mengenai penyakit yang dialami. Namun konsep ockham razor juga dapat digunakan menganalisa disiplin ilmu sosial. Karena konsep ockham razor merupakan perihal membentuk kerangka berpikir yang efektif dan efisien dalam menganalisa suatu hal (Ockham, 2021).

Bagaikan pisau, diperlukan analisa yang tajam agar dapat memilah mana perihal yang perlu dan tidak perlu dalam merumuskan dan mengidentifikasi suatu masalah. Digambarkan sebagai pisau yang dapat memilah antara daging dan lemak, sehingga dengan adanya ockham razor analisa terhadap sebuah kasus dapat dengan mudah ditentukan yang dianggap perlu dan sesuai untuk menjawab persoalan. Ockham razor merupakan prinsip bahwa jawaban yang sederhana dianggap lebih bijak. Ockham dapat mengurangi bahkan menghilangkan sama sekali pembahasan

yang tidak perlu dalam sebuah analisa, sehingga dapat menemukan solusi yang sederhana dan efisien.

Konsep ockham razor tersebut apabila digunakan dalam multidisiplin keilmuan, maka dapat memangkas suatu simpulan yang dianggap penting dalam mengidentifikasi dan merumuskan pengentasan kemiskinan. Dengan kerangka berpikir yang efisien dan efektif maka dapat merumuskan disiplin keilmuan apa saja yang berkaitan untuk mengidentifikasi dan pengentasan kemiskinan. Sehingga dapat melahirkan simpulan yang sederhana dan solutif. Begitu halnya dengan konsep multidisiplin apabila tidak mampu merumuskan konsepsi yang sederhana dalam merumuskan pengentasan kemiskinan, maka jalan keluar tersebut akan semakin rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Dalam konsep ockah razor jawaban yang sederhana dianggap lebih baik dan lebih benar jika dibandingkan dengan jalan keluar yang rumit dan berbelit.

Ketiga, bagi Mubyarto dengan menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang dianggap bentuk paling kongkret dari usaha bersama dan penerapan ekonomi Pancasila. Mubyarto menilai bahwa koperasi merupakan bentuk yang nyata dalam penerapan ekonomi yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dengan adanya koperasi menurut Mubyarto sebagai fasilitas untuk berkembang secara bersama dan dapat saling membantu perekonomian masyarakat. Adanya kerja sama untuk mencapai tujuan dengan prinsip demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah pimpinan dan pemilikan anggota masyarakat (Mubyarto, 2004b: 8).

Menurut Mubyarto koperasi dapat menjadikan kesejahteraan karena di dalamnya menekankan kemakmuran masyarakat diutamakan daripada kemakmuran orang-seorang. Sebagaimana pandangan Mubyarto dengan berdasarkan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar atau asas kekeluargaan (Mubyarto, 1982: 13). Mubyarto menyatakan bahwa dalam koperasi tidak dapat dijadikan sumber penghasilan, itu merupakan bentuk membangun usaha bersama, sedangkan sumber penghasilan hanya boleh diperoleh dari kerja (Mubyarto, 1982: 108).

Dilain sisi Mubyarto menilai bahwa terdapat perbedaan antara koperasi dan perusahaan swasta. Secara prinsip Mubyarto menilai bahwa perusahaan swasta memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan besar atau persaingan bebas, sedangkan koperasi lebih mengutamakan usaha bersama untuk memperjuangkan kepentingan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini Mubyarto menekankan pada persaingan yang sehat sehingga tidak mematikan usaha yang lemah (Mubyarto, 1982: 105). Karena pada prinsipnya koperasi tujuan koperasi adalah usaha bersama untuk kesejahteraan anggotanya dan pemberdayaan yang lebih besar terhadap peranan anggota koperasi dalam mengentaskan kemiskinan (Mubyarto, 1982: 42).

4.1.3 Analisis Penulis Tentang Koperasi

Berdasarkan pemikiran Mubyarto terhadap koperasi bahwa yang dianggap berhasil jika mampu membentuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya usaha bersama melalui koperasi. Namun untuk mencapai sejahtera dan kemandirian secara merata di berbagai koperasi perlu adanya profesionalisme

dalam mengelola dan mengembangkan koperasi. Pada pemikiran koperasi dari Mubyarto tidak menjelaskan mengenai strategi dalam koperasi yang dimaksud agar mampu membentuk kemandirian masyarakat hingga mencapai kesejahteraan. Mubyarto tidak menjelaskan bagaimana edukasi dan pendampingan yang efektif bagi masyarakat terhadap pengelolaan koperasi. Hal ini penting adanya intensitas dari tenaga pendamping ahli terhadap pengelolaan dan pengembangan koperasi agar mampu membentuk pengelolaan koperasi yang progresif.

Sebagaimana pemikiran Mubyarto mengenai demokrasi ekonomi yakni produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah pimpinan dan pemilikan anggota masyarakat. Konsep tersebut memerlukan adanya edukasi yang masif terhadap masyarakat agar memahami peran kinerja hingga pemahaman terhadap kepemimpinan untuk mengelola dan mengembangkan koperasi. Mubyarto tidak menjelaskan bagaimana konsep pengelolaan koperasi yang ideal untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat terlebih untuk pengentasan kemiskinan. Jika masyarakat kurang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dan pengembangan koperasi maka akan jauh dari keberhasilan. Tidak sedikit koperasi yang berhasil dikelola oleh tenaga profesional dari berbagai sektor seperti koperasi properti dan sebagainya.

Masih kurangnya pengembangan SDM anggota maupun pengelola koperasi, agar dapat menjangkau pangsa pasar dan bermitra yang lebih luas. Hal ini tentu berkaitan dengan kemampuan manajemen koperasi yang dikelola oleh pengurus koperasi, selama pengurus koperasi tidak memiliki mental bisnis maka akan sulit untuk berkembang. Jika hanya mengandalkan budaya mengurus koperasi

seperti halnya memerintah dalam birokrasi atau lembaga maka potensi untuk lebih berkembang tidak seperti memiliki karakter pebisnis.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta bahwa koperasi merupakan badan usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan ekonomi anggotanya berdasarkan tolong-menolong. Hal ini tentu dilambungkan sebagai harapan bagi masyarakat yang lemah ekonomi dengan adanya *self-help* sesama anggota (Andjar, 2005). Oleh sebab itu koperasi mengharuskan untuk memperhatikan kepentingan anggota-anggotanya serta kesejahteraannya. Maka tidak mungkin koperasi dikelola oleh sumber daya manusia yang tidak memiliki karakter dan daya pikir yang maju. Serta memiliki semangat bisnis untuk mengembangkan usaha bersama yang dikelola tersebut agar mampu mencapai kesejahteraan anggota-anggota.

4.2 Relevansi Pemikiran Mubyarto Terhadap Kebijakan Pemerintah

Kebijakan anti kemiskinan yang digaungkan pemerintah saat ini melalui Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dengan program prioritas pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran dengan adanya peningkatan akses pemodalan dan peningkatan kualitas produk. Jika dikaitkan dengan pemikiran Mubyarto mengenai pengentasan kemiskinan, terutama konsep gotong-royong memiliki kesamaan dalam esensinya, yakni upaya pembangunan berasal dari masyarakat (*bottom-up*), (Novrizaldi, 2021).

Konsep pemikiran Mubyarto yang mendambakan adanya pemerataan kebijakan sosial dan ekonomi dalam proses pembangunan. Hal ini memiliki

relevansi dengan kebijakan pemerintah tahun 2020 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial. Pemerintah memutuskan kebijakan dalam APBN tentang program prioritas nasional 1 dan 2 yang termuat dalam Peraturan Presiden No.122 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2021. Program prioritas nasional 1 yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, sedangkan program prioritas nasional 2 memiliki fokus terhadap pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Kementerian Koperasi dan UKM melakukan terobosan kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini diputuskan melalui peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.5 tahun 2020. Ada 3 kebijakan yang mengarah pada pengembangan koperasi antara lain, modernisasi koperasi dan penciptaan wirausaha baru, meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global, dan reformasi tata kelola pengembangan koperasi dan ukm yang berorientasi layanan prima. Dalam realisasinya menggunakan konsep *one gate policy* dengan harapan dapat melakukan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat. Kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep koperasi Mubyarto yang menekankan adanya semangat kolektif untuk tujuan bersama. Meski ada perbedaan dengan prinsip koperasi Mubyarto yang mengutamakan usaha bersama daripada persaingan bebas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akhir dari pembahasan Skripsi mengenai Studi Pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Mubyarto merupakan ekonom Indonesia yang memiliki konsep perekonomian dalam pengentasan kemiskinan. Konsepsi pemikiran Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila berbeda dengan konsep sosialisme maupun kapitalisme, dalam penerapannya didasari atas nilai moral dan kemanusiaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa pokok pemikiran Mubyarto dalam mengentaskan kemiskinan. Antara lain pemikiran Mubyarto dengan menggunakan pendekatan Gotong-royong, multi disiplin keilmuan, dan koperasi sebagai saka guru perekonomian.

Sebagaimana konsepsi gotong-royong menurut Mubyarto dengan mengedepankan nilai kolektif dan mengesampingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Konsep tersebut dianggap dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki semangat kolektif yang mengakar. Semangat gotong-royong menurut Mubyarto bisa di mulai dari produksi dalam skala mikro hingga terbangunnya jaringan distribusi sesama masyarakat. Mubyarto lebih menekankan gotong-royong secara prinsip, namun tidak membahas bagaimana masyarakat bisa terbentuk secara gotong-royong. Sehingga semangat kolektif mampu disadari bersama dan mengakar bagi masyarakat.

Selain gotong-royong pengentasan kemiskinan juga diformulasikan dengan pendekatan multidisiplin keilmuan. Konsep tersebut dirumuskan dengan berbagai

disiplin keilmuan yang berbeda untuk mencari alternatif pengentasan kemiskinan. Menggunakan pendekatan multidisiplin keilmuan menurut Mubyarto dapat lebih komprehensif dalam mengidentifikasi persoalan kemiskinan. Meskipun konsep tersebut masih kompleks dan bersifat general, perlu adanya pendekatan yang lebih sederhana agar mampu mengidentifikasi pengaruh kemiskinan secara komprehensif. Salah satu alternatif yang dapat digunakan yakni dengan menggunakan metode ockham razor, yakni pisau analisa yang dapat memilah antara faktor yang berkaitan secara signifikan atau tidak terhadap kemiskinan.

Konsep lain menurut Mubyarto yang dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan yakni dengan menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Bagi Mubyarto koperasi adalah bentuk konkret dari perekonomian yang dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Di sisi lain Mubyarto menilai bahwa dalam koperasi tidak dapat dijadikan sumber penghasilan, karena itu merupakan lembaga untuk usaha bersama. Namun, apabila tanpa adanya pendampingan dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap pengelola dan anggota koperasi, maka tidak dapat diandalkan sebagai sumber kekuatan masyarakat yang mapan.

Permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia dalam dekade terakhir bukan hanya pengangguran, namun ketika dilihat lebih detail adalah persoalan kemiskinan. Di mana pengangguran tidak selalu miskin, namun kemiskinan kehidupan seorang dapat menjadikan beban negara. Mubyarto merupakan salah satu ekonom yang menggunakan konsep ekonomi Pancasila terhadap perekonomian Indonesia.

5.2 Saran

Dari uraian di atas, perkenankan penulis memberikan saran-saran.

1. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini bagi akademisi dapat memahami lebih lanjut mengenai pemikiran Mubyarto tentang ekonomi pancasila terutama dalam pengentasan kemiskinan. Serta adanya penelitian lebih lanjut agar mampu dikembangkan pemikiran Mubyarto.
2. Diharapkan bagi seluruh akademis mampu mengembangkan pemikiran ekonomi yang organik, sebagaimana yang dibutuhkan dan keberpihakan terhadap masyarakat Indonesia.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dalam pembangunan ekonomi serta pengentasan kemiskinan dengan langkah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pembangunan ekonomi sesuai dengan konsep ekonomi pancasila sebagaimana dikembangkan oleh Mubyarto.
4. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu diharapkan saran dan kritik penulis demi mencapai kesempurnaan skripsi serta pengembangan skripsi yang berkaitan dengan pemikiran terhadap pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua dan Adi Sasono (1981), Indonesia : Ketergantungan Dan Keterbelakangan, Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan
- Asghar, Ali Engineer (2009), Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baran, Paul (1957), Political Economy Of Growth, New York : Monthly Review Press
- BPS (2015). Raw Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2014.
- Chambers, Robert (1983), Rural Development : Putting the Last First. London : Longman Group Ltd)
- Dawam Raharjo (2004), *Ekonomi Pancasila : Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil Dan Makmur*, Pustep UGM, Yogyakarta.
- Dumairy dan Tarli Nugroho (2016), *Ekonomi Pancasila : Warisan Pemikiran Mubyarto*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hikmat, Harry (2004), Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora : Bandung.
- Kropotkin, Peter. 2006. Gotong Royong Kunci Kesejahteraan Sosial; Tumbangnya Darwinisme Sosial. Piramedia, Depok.
- Koentjoroningrat. (1998). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press.
- Koentjoroningrat. (2002). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan..* Jakarta: Gramedia Utama.
- Kwik Kian Gie (1995), Analisis Ekonomi Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Melis, (2019), “Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 182.
- Mubyarto (1980), *Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi dan Keadilan*, UGM Press, Yogyakarta.

- Mubyarto (1982), *Moral Ekonomi Pancasila*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- (Mubyarto, (2000), *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto (2002), *Ekonomi Pancasila : Landasan pikir dan misi pendirian*, PUSTEP UGM, BPFE, Yogyakarta.
- Mubayarto (2004a), *Teknokrat dan ekonomi Pancasila*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto (2004b), *Ekonomi Pasar Populis*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto (2004c), *Gagasan Besar Ekonomi dan Kemajuan Kemanusiaan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto (2004d), *Pendidikan Ekonomi Kita*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto (2004e), *Pendidikan Ekonomi Sekolah Lanjut*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto (2004f), *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto (2004g), *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media)
- Mubyarto (2005a), *Ekonomi Pancasila*, Renungan satu tahun Pustep UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto (2005b), *Ekonomi Terjajah*, Pustep UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto (2005c), *Reformasi Pengajaran Ilmu-ilmu sosial-humaniora di UGM*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto (2005d), *Satu Abad Sumpah Pemuda Visi Indonesia 2028*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Mubyarto dan Awan Santosa (2004), *Pendidikan Ekonomi Alternatif di Sekolah-sekolah Lanjut*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Nafziger, E. Wayne (2005), "Economic Development. Fourth Edition", Cambridge University Press. Cambridge.
- Nanga, Muana dkk, (2018), Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Analisis Wilayah dan Kemiskinan Tinggi, Hal.9)
- Novrizaldi. 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat>", diakses pada pukul 20:55 Wib 10 Agustus 2021.

- Puthut Indroyono, *“Keadilan Sosial dalam Pembangunan Inklusif”*, Mubyarto Istitute, tanpa tahun, Hal.1.
- Rah Adi Fahmi Ginanjar, Sugeng Setyadi, Umayatu Suiroh, (2018), “Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten”, JEQu.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencna Kerja Pemerintah Tahun 2021.
- Revrisond Baswir (2009), *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sen, Amartya. (1999) *Development as Freedom*, New York: Anchor Books.
- Sen, A. (1981), “Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation”. Clarendon Press, Oxford.
- Suharto, Edi, 2005 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Refika Aditama Bandung*
- Sumodiningrat, Gunawan, (1999), “Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Supardjan & Suyatno, Hempri, 2003 *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai pemberdayaan Aditya Media, Yogyakarta*
- Syafaruddin Usman dan Isnawati (2009), *Neoliberalisme Mengguncang Indonesia*, Narasi, Yogyakarta.
- Todaro, M. P. and Smith. S (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M.P dan Smith, Stephen.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan oleh Haris Munandar. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. Njuk di edit sek.

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith (2015), *Economic Development*. 12th Edition. Pearson Ltd. New York.

UNDP, (2010). *Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*. UNDP, New York.

Widjajanti Isdijoso dkk, (2016), "*Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*", The SMERU Research Institute.

William of Ockham, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Ockham/> . diakses 17 Mei 2021.

(Badan Pusat Statistika (BPS), (2020), *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020* No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020, dari www.bps.go.id)

(BadanPusatStatistika, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> , diakses pukul 13:01, 26 Agustus 2021)

(Badan Pusat Statistika, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>, di akses pukul 12: 56, 9 Desember 2020)

(https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386157387.pdf, di akses pada pukul 13:24, 9 Desember 2020)

Lampiran (tabel/gambar)

Ada empat seminar Ekonomi Pancasila yang kemudian menjadi titik perkembangannya :

Tabel 3.1 : Seminar Ekonomi Pancasila

Waktu / Tempat	Judul	Penyelenggara	Pembicara
19 September 1980, Yogyakarta.	Seminar Ekonomi Pancasila	Fakultas Ekonomi UGM	Ace Partadiredja, Bambang Riyanto, Dibyo Prabowo, Boediono, Dawam Rahardjo, Hadori Yunus dll
19-20 Oktober 1980, Jakarta.	Seminar Sistem Ekonomi Pancasila	Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP)	Mubyarto, Arief Budiman, Bambang Krisnamurthi, Sarbini.
23-26 Juni 1981, Jakarta.	Simposium Sistem Ekonomi Pancasila	Dewan pertahanan keamanan Nasional dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia	Abdul Rachman Panetto, Adi Sasono, Affendi Anwar, Ariana Abdulkadir, Dawam Rahardjo, Mubyarto dll.

19 September 1981, Yogyakarta.	Seminar II Ekonomi Pancasila	Fakultas Ekonomi UGM	Azhar Basyir, Frans Seda, Sudarsono, Mubyarto, Samiadji, Djayengminardo dll.
--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

(Dumairy dan Tarli, 2016: 70)